



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

KARYA AKHIR

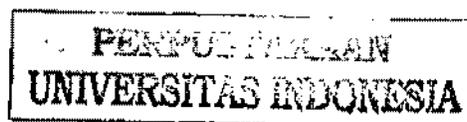
**ANALISIS SIGNIFIKANSI PERBEDAAN
STANDAR AUDIT PEMERINTAH (SAP),
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) DAN
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK (SPAP)
DALAM INDEPENDENSI PELAPORAN KEUANGAN**

DIAJUKAN OLEH :

**MOHAMMAD RUSYDI TUASIKAL
6603280018**

T
25769

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2007





TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

Nama : **Mohammad Rusydi Tuasikal**
Nomor Mahasiswa : **6603280018**
Konsentrasi : **Strategi Keuangan**

Judul Karya Akhir : **Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Dalam Independensi Pelaporan Keuangan**

23 APR 2008
Tanggal : Ketua Program Studi
Magister Akuntansi : **Setro Anggoro Dewo, Ph.D.**

23 APR 2008
Tanggal : Pembimbing Karya Akhir : **L. Sensi W, See, MM, BAP**

KATA PENGANTAR

Sembah Syukur hanya kupersembahkan kehadiratMu ya Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam berkat rahmat dan karuniaMu, sehingga karya akhir dengan judul “Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Indonesia dapat terselesaikan. (Dibalik kesulitan pasti ada kemudahan – QS 94:6).

Segala kemampuan, waktu dan tenaga telah kucurahkan untuk kesempurnaan karya tulis ini, tanpa mengesampingkan kekurangan akan cakrawala pengetahuan dan ketrampilan yang kumiliki.

Rasa terima kasih yang mendalam ingin kusampaikan kepada beberapa orang yang sangat berjasa dan berperan selama perkuliahan hingga penyelesaian karya akhir ini melalui kontribusi pikiran, tenaga, waktu dan dukungan moral selama ini.

Ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Setio Anggoro Dewo selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang memberikan kesempatan untuk mengikuti program ini.
2. Bapak L. Sensi Wondabio See, MM selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, pengertian, kesabaran dan perhatian yang diberikan. Dedikasi yang tinggi dan berbagai kemudahan, saran dan masukan-masukan yang sangat berharga dan membantu selama penyelesaian penulisan karya akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Soekrisno Agoes dan Bapak Djamaludin Iskak selaku Dosen Penguji.
4. Ibu Lindawati Gani, selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dukungan hingga dapat menyelesaikan kuliah di Maksi UI.
5. Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu tercinta yang sangat saya hormati yang telah sabar memberikan dukungan do'a dan moril. Rasydi tak bisa membalas kebaikan kalian berdua, kecuali menjalankan amanah dan dukungan yang telah kalian berikan (karya akhir ini Rasydi persembahkan untuk kalian berdua, tanda kepercayaan dan kasih sayang yang kalian berikan).

6. Kakak-kakakku tercinta Mas Iqbal, Mbak Ida, Mas Irfan, Mas Hatta, dan Mas Abduh serta adik-adik yang kucintai Natsir dan Nia atas dorongan dan dukungan baik moril maupun materiil serta do'anya. Terima kasih semuanya.
7. Istriku Dini Wulandari serta anak-anakku Taufiq, Ghaffar, dan Shaffa atas doanya, cintanya, pengertiannya, dukungan, dan selalu menjadi inspirasi dan semangat yang tidak ada habisnya.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Maksi UI buat pengetahuan yang luar biasa yang diberikan dan karyawan Maksi Mba' Debo, Mba' Sarah, Mba' Desi, Mas Iwan, Mas Bambang, Mas Imung, dan seluruh karyawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga penulisan Karya Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, Desember 2007
Penulis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Masyarakat awam pada umumnya mengira bahwa akuntansi sekadar pembukuan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang suatu perusahaan. Namun setelah terjadi kasus-kasus skandal keuangan yang melibatkan korporasi besar di Amerika Serikat seperti Enron, WorldCom, Xerox, Merck, Tyco Intl, Global Crossing, dan Adheltin, masyarakat baru menyadari bahwa produk akuntansi tersebut tidak sekedar buku pencatatan keuangan mengingat cukup luas implikasinya bagi dunia bisnis.

Penyebab terjadinya skandal akuntansi ini tak lain adalah ekkses penyalahgunaan pedoman akuntansi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan publik tersebut. Pedoman tersebut di Amerika dikenal dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) yang juga digunakan di Indonesia dengan istilah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Pernyataan Standar Audit (PSA) merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan dalam melaksanakan perikatan audit.

Profesi akuntan publik membangun keunggulan kompetitifnya dalam masyarakat melalui pengembangan secara berkelanjutan. Pengembangan ini dimaksudkan agar jenis dan kualitas jasa yang disediakan oleh profesi akuntan publik memenuhi kebutuhan masyarakat.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu pelaksanaan Pemeriksaan dan persyaratan pelaporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan

menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pekerjaannya dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pekerjaannya tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara serta pengambilan keputusan Pemerintah. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, akuntan publik berpedoman pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. Sedangkan BPK-RI dalam pelaksanaan tugasnya awalnya berpedoman pada Standar Audit Pemerintah yang sejak akhir tahun 2007 telah diubah menjadi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

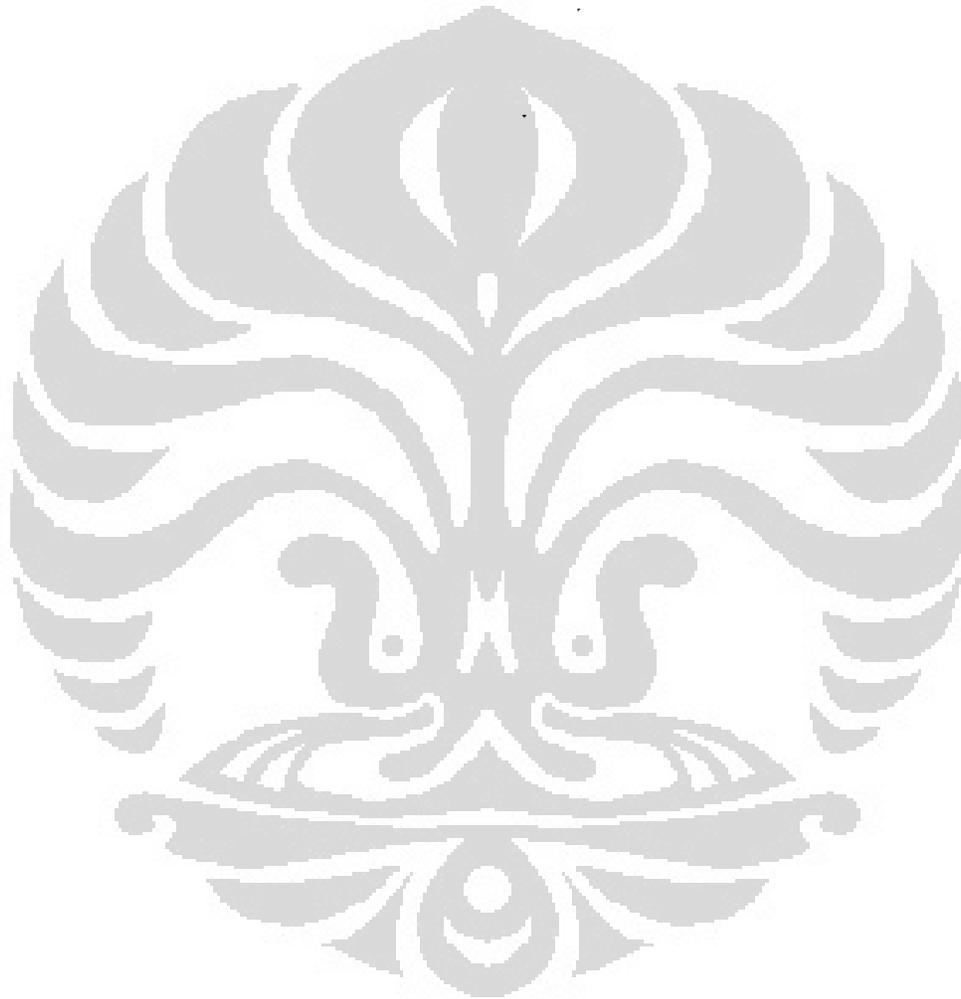
Dengan adanya perbedaan standar pemeriksaan seperti tersebut diatas, bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan BPK-RI. Dalam karya akhir ini penulis akan melakukan perbandingan standar/pedoman audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dengan BPK-RI. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metoda statistik melalui uji proporsi dengan metode *chi-square* dan uji hipotesa.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xi
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Peneliuan	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Identifikasi Masalah	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 Tinjauan Pustaka	11
2.1 Auditing	11
2.1.1 Pengertian Audit	11
2.1.2 Jenis-jenis Audit	14
2.2 Profesi Akuntan	15
2.2.1 Jenis-jenis Akuntan	16
2.2.2 Profesi Akuntan Publik	17
2.3 Kantor Akuntan Publik	19
2.3.1 Kategori Kantor Akuntan Publik	19
2.3.2 Jasa-jasa Yang Diberikan Oleh KAP	20
2.4 Pengertian Independensi Akuntan Publik	21
2.5 Tujuan Independensi Akuntan Publik	22
2.6 Pengaturan Tentang Independensi Akuntan Puiblik	35
2.7 Pentingnya Independensi Akuntan Publik	42
2.8 Persepsi Akuntan Publik Terhadap Independensi	44
2.9 Kerangka Pemikiran	47
2.10 Perumusan Hipotesa	50

BAB 3	Metodologi Penelitian	51
	3.1 Unit Analisis	51
	3.2 Rancangan Penelitian	51
	3.3 Variabel dan Pengukuran	52
	3.4 Definisi Operasional Variabel	52
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
	3.5.1 Kuesioner	54
	3.5.2 Wawancara	54
	3.5.3 Studi Kepustakaan	54
	3.6 Metode Analisis Data	55
BAB 4	Analisis dan Pembahasan	57
	4.1 Obyek Penelitian	57
	4.2 Faktor Independen	58
	4.2.1 Independensi secara Kenyataan (<i>Independence in Fact</i>)	58
	4.2.2 Independensi dalam Penampilan (<i>Independence in Appearance</i>)	60
	4.2.3 Jasa-jasa Selain Audit	61
	4.2.4 Imbalan Jasa	61
	4.2.5 Penerimaan Barang Dari Klien	62
	4.3 Profil Responden	62
	4.3.1 Jenis Kelamin Responden	63
	4.3.2 Umur Responden	63
	4.3.3 Lama Bekerja	64
	4.3.4 Jenjang Pendidikan	64
	4.3.5 Jenjang Kedudukan	65
	4.4 Analisis dan Pembahasan	65
	4.4.1 Analisis atas Usaha Bersikap Independen Dari Segi Fakta (<i>Independence in Fact</i>)	65
	4.4.2 Independen Dari Segi Penampilan (<i>Independence in Appearance</i>)	75
BAB 5	Kesimpulan dan Saran	91

5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	92
	Daftar Pustaka	93
	Lampiran	95



DAFTAR TABEL

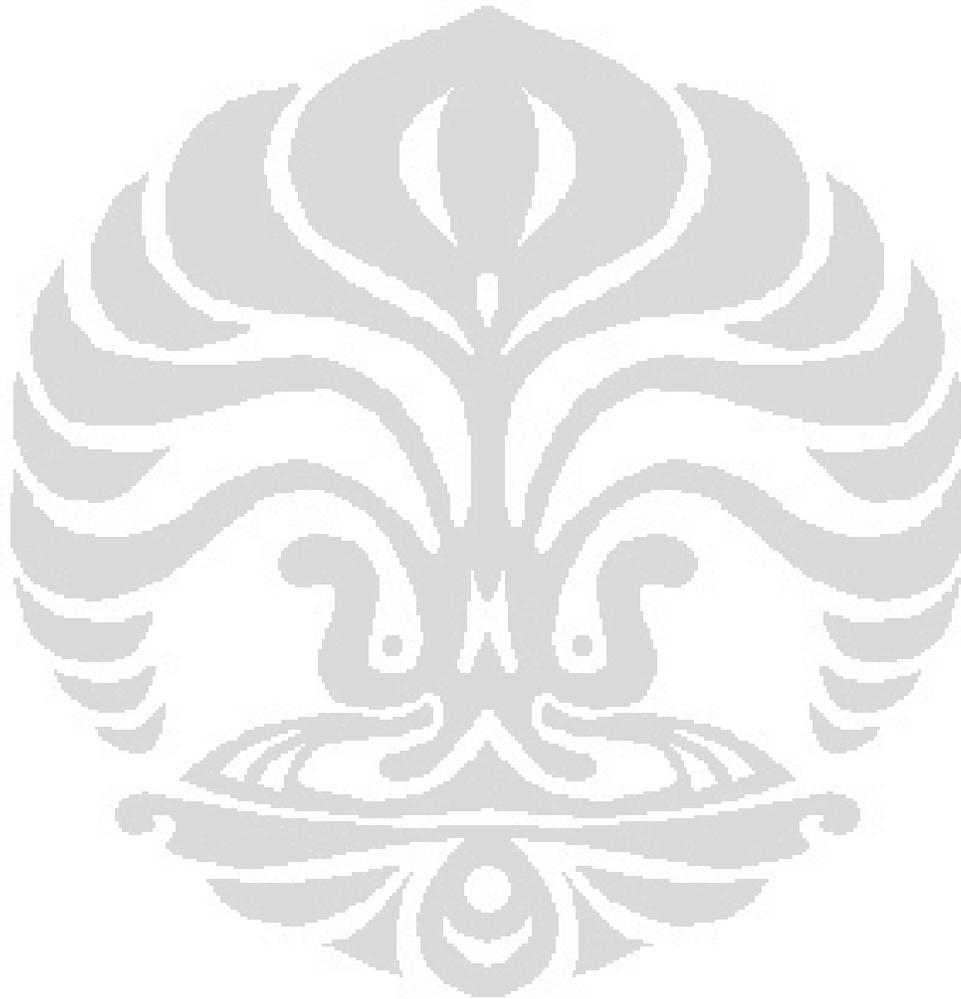
Tabel 4.1	Perbandingan Populasi dengan Sampel	62
Tabel 4.2	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4.3	Jumlah Responden Berdasarkan Umur Responden	63
Tabel 4.4	Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja	64
Tabel 4.5	Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	64
Tabel 4.5	Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	64
Tabel 4.6	Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Kedudukan	65
Tabel 4.7	Jawaban Responden Mengenai Sikap Kejujuran, Obyektifitas, dan Tidak Memihak Auditor	66
Tabel 4.8	Chi-Square Tests Kejujuran, Obyektifitas, dan Tidak Memihak Terhadap Klien	66
Tabel 4.9	Jawaban Responden Mengenai Penggunaan Jasa Penilai Independen Jika Mengalami Kesulitan untuk Menilai Sesuatu/Barang Diluar Keahlian Profesinya	67
Tabel 4.10	Chi-Square Tests Penggunaan Jasa Penilai Independen Jika Mengalami Kesulitan untuk Menilai Sesuatu/Barang Diluar Keahlian Profesinya	68
Tabel 4.11	Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan terhadap Semua Standar Profesi	69
Tabel 4.12	Chi-Square Tests Kepatuhan Terhadap Semua Standar Profesi	69
Tabel 4.13	Jawaban Responden Mengenai Menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Dalam Penugasan Audit	70
Tabel 4.14	Chi-Square Tests Menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Dalam Penugasan Audit	70
Tabel 4.15	Jawaban Responden Mengenai Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Mempertahankan Independensi dengan Sejujurnya	71
Tabel 4.16	Chi-Square Tests Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Mempertahankan Independensi dengan Sejujurnya	71

Tabel 4.17	Jawaban Responden Mengenai Kepemilikan Izin Untuk Mengaudit Perusahaan Gio Publik	73
Tabel 4.18	Chi-Square Tests Mengenai Kepemilikan Izin Untuk Mengaudit Perusahaan Gio Publik	73
Tabel 4.19	Jawaban Responden Mengenai Menanyakan Hal Yang Meragukan ke Badan Komite Audit	74
Tabel 4.20	Chi-Square Tests Menanyakan Hal Yang Meragukan ke Badan Komite Audit	75
Tabel 4.21	Jawaban Responden Mengenai Apabila Auditor Mempunyai Saham di Salah Satu Perusahaan yang Diauditnya	76
Tabel 4.22	Chi-Square Tests Auditor Mempunyai Saham di Salah Satu Perusahaan yang Diauditnya	76
Tabel 4.23	Jawaban Responden Mengenai Apabila Auditor Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Perusahaan Yang Sedang Diaudit	77
Tabel 4.24	Chi-Square Tests Mengenai Apabila Auditor Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Perusahaan Yang Sedang Diaudit	78
Tabel 4.25	Jawaban Responden Mengenai Apabila Kantor Akuntan Selain Memberikan Jasa Audit Juga Memberikan Jasa-jasanya Kepada Klien Yang Sama	79
Tabel 4.26	Chi-Square Tests Mengenai Apabila Kantor Akuntan Selain Memberikan Jasa Audit Juga Memberikan Jasa-jasanya Kepada Klien Yang Sama	79
Tabel 4.27	Jawaban Responden Mengenai Pemberian Jasa Selain Audit Dapat Meningkatkan Manfaat Informasi Yang Disajikan Di Dalam Laporan Pemeriksaan AKuntan Publik	80
Tabel 4.28	Chi-Square Tests Mengenai Pemberian Jasa Selain Audit Dapat Meningkatkan Manfaat Informasi Yang Disajikan Di Dalam Laporan Pemeriksaan AKuntan Publik	81
Tabel 4.29	Jawaban Responden Mengenai Pemberian Jasa Non Audit	82
Tabel 4.30	Chi-Square Tests Jawaban Responden Mengenai Pemberian Jasa Non Audit	82

Tabel 4.31	Jawaban Responden Mengenai Penghentian Pelaksanaan Audit Apabila Klien Menunggak Audit Fee Selama Lebih Dari 1 Tahun	83
Tabel 4.32	Chi-Square Tests Penghentian Pelaksanaan Audit Apabila Klien Menunggak Audit Fee Selama Lebih Dari 1 Tahun	83
Tabel 4.33	Jawaban Responden Mengenai Besarnya Audit Fee Yang Diterima Merupakan Total Pendapatan	84
Tabel 4.34	Chi-Square Tests Mengenai Besarnya Audit Fee Yang Diterima Merupakan Total Pendapatan	85
Tabel 4.35	Jawaban Responden Mengenai Audit Fee Tergantung Dari Besar/Kecilnya Ruang Lingkup Pekerjaan	86
Tabel 4.36	Chi-Square Tests Mengenai Audit Fee Tergantung Dari Besar/Kecilnya Ruang Lingkup Pekerjaan	86
Tabel 4.37	Jawaban Responden Mengenai Pemberian Opini Sesuai Dengan Keinginan Klien	87
Tabel 4.38	Chi-Square Tests Mengenai Pemberian Opini Sesuai Dengan Keinginan Klien	87
Tabel 4.39	Jawaban Responden Mengenai Meminta Atau Menerima Barang Dari Klien Setelah Penugasan Berakhir	88
Tabel 4.40	Chi-Square Tests Mengenai Meminta Atau Menerima Barang Dari Klien Setelah Penugasan Berakhir	89
Tabel 4.41	Jawaban Responden Mengenai Pemberian Hadiah Setelah Penugasan Berakhir	90
Tabel 4.42	Chi-Square Tests Mengenai Pemberian Hadiah Setelah Penugasan Berakhir	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	A Framework for Understanding the Antecedents and Consequences of Independence Risk	25
Gambar 2.2	Continuum of auditing Firm Culture	28
Gambar 2.3	Bagan Kerangka Pemikiran	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat awam pada umumnya mengira bahwa akuntansi sekadar pembukuan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang suatu perusahaan. Namun setelah terjadi kasus-kasus skandal keuangan yang melibatkan korporasi besar di Amerika Serikat seperti Enron, WorldCom, Xerox, Merck, Tyco Intl, Global Crossing, dan Adheltin, masyarakat baru menyadari bahwa produk akuntansi tersebut tidak sekedar buku pencatatan keuangan mengingat cukup luas implikasinya bagi dunia bisnis. Skandal keuangan tersebut berdampak pada turunnya Indeks Dow Jones pada saat itu sampai diatas 17%. Kenyataan tersebut membuka mata kita bahwa "moral hazard" dalam penyusunan laporan keuangan berdampak pada dirugikannya publik, khususnya para pemegang saham.

Penyebab terjadinya skandal akuntansi ini tak lain adalah eksekusi penyalahgunaan pedoman akuntansi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan publik tersebut. Pedoman tersebut di Amerika dikenal dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) yang juga digunakan di Indonesia dengan istilah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Meskipun yang diekspos di media massa global hanya Enron, Worldcom, dan Xerox, sebetulnya ada beberapa nama perusahaan lain dengan kemungkinan terjadi praktek manipulasi dalam bidang akuntansi, sehingga laporan keuangannya menyesatkan dan tentu akibatnya merugikan publik.

Laporan keuangan yang manipulatif, misalnya dengan cara menggelembungkan pendapatan, mengakibatkan harga saham menjadi tinggi sekali, jauh di atas harga yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan para pembeli saham yang baru pasti merugi, dan sebaliknya, para pemegang saham yang sudah ada akan menjual saham mereka dan akan meraih keuntungan yang luar biasa. Di antara pemegang saham ini tidak tertutup kemungkinan para pemimpin perusahaan dan mereka yang dekat dengan pemimpin perusahaan, termasuk para elite politik di Amerika Serikat.

Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang turbulen dan kompetitif, setiap profesi berusaha untuk senantiasa menemukan kembali keunggulan kompetitifnya, agar keberadaan profesi tersebut tetap bernilai tambah bagi masyarakat. Profesi akuntan publik membangun keunggulan kompetitifnya dalam masyarakat melalui pengembangan secara berkelanjutan. Pengembangan ini dimaksudkan agar jenis dan kualitas jasa yang disediakan oleh profesi akuntan publik memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap standar profesional yang dipakai sebagai dasar oleh profesi akuntan publik dalam memberikan layanan jasa bermutu bagi masyarakat. Bentuk perubahan tersebut dilakukan sebagai respon profesi akuntan publik terhadap tuntutan perubahan kebutuhan masyarakat atas mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi. Dari hasil pemantauan terhadap tren perubahan lingkungan Dewan telah berhasil menjabarkan berbagai persyaratan yang dituntut oleh masyarakat pemakai jasa.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Pernyataan Standar Audit (PSA) merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan dalam melaksanakan perikatan audit.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu pelaksanaan Pemeriksaan dan persyaratan pelaporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pekerjaannya dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pekerjaannya tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara serta pengambilan keputusan Pemerintah. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.

Tujuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dimaksudkan untuk (1) Sebagai patokan bagi para pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara agar dapat memelihara kompetensi, integritas, obyektivitas dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksankannya. (2) sebagai patokan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, agar dapat memelihara kompetensi, integritas, obyektivitas dan independensi.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Penerapan SPKN berlaku bagi (1). Badan Pemeriksa Keuangan. (2). Akuntan Publik yang melakukan pekerjaan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. (3). Auditor yang melakukan audit atas kegiatan pada entitas non keuangan negara yang mendapat bantuan fasilitas dari keuangan negara. (4). Aparat pemeriksa intern pemerintah sebagai payung (acuan) dalam penyusunan standar yang diperlukan.

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, Standar Audit Pemerintahan (SAP) memasukan empat standar pelaporan profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai berikut; (1). Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. (2). Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. (3) Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. (4). Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau mengenai suatu hal yang menyebabkan bahwa pernyataan pendapat demikian tidak dapat diberikan.

SAP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan hasil referensi dari *yellow book* tahun 1994 (*Government Auditing Standar – GAO-USA*). SAP harus digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Adapun jenis pemeriksaannya meliputi; (1) Audit Keuangan dengan *Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan*

menggunakan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2) Audit Kinerja.

Pengelolaan Keuangan Negara telah mengalami perkembangan pesat sejalan dengan kegiatan Pemerintah yang semakin pesat dan sejalan pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengelolaan Keuangan Negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya penyempurnaan SAP, adapun dasarnya adalah: (1), Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E yang menyebutkan bahwa (a). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (b), Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (c) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan yang sesuai dengan undang-undang. (2) Ditetapkannya tiga Undang-Undang dibidang Keuangan Negara yakni (a) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (b). Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan. (c) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (3) Terjadinya perubahan/penyempurnaan pada referensi utama *Yellow Book, GAO-USA*. (4), Perubahan dan penyempurnaan SPAP-IAI.

Adanya Badan Pemeriksa Keuangan dan tugasnya diamanatkan oleh Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945. Amanat ini direalisasikan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Melihat karakteristik kegiatan dari BPK diatas maka dilakukan penyesuaian dengan *Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan*

standar audit BPK dengan mengacu pada SPAP dari IAI. Kemudian disusunlah SAP (dasar Audit BPK) ini yang menjadi pedoman pelaksanaan pemeriksaan BPK. Ternyata karena adanya fungsi khusus BPK dalam melakukan pemeriksaan seperti yang dijelaskan diatas telah dibuat beberapa penyesuaian pada SPAP dalam SAP, yang mengakibatkan beberapa perbedaan perlakuan audit pada BPK. Dimana perbedaan tersebut diantaranya adalah :

1. SPAP mengatur secara detail tentang semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, sedangkan dalam SAP hanya bersifat umum sehingga masih dibutuhkan acuan lain yang bersifat detail untuk dijadikan acuan dalam sebuah pekerjaan audit yang biasanya disebut dengan petunjuk teknis (bentuknya berbeda-beda untuk setiap jenis audit dan bersifat tentatif).
2. Dalam SPAP diatur/ada acuan tentang bentuk opini yang diberikan terhadap hasil audit, sedangkan dalam SAP tidak diatur/tidak ada acuan tentang bentuk opini yang diberikan terhadap hasil audit.
3. Dalam Perhitungan Anggaran Negara (salah satu hasil audit BPK) tidak ada kewajaran angka, yang ada adalah kebenaran angka (sesuai dengan ICW dan IAR).
4. Dalam SPAP ada tiga standar yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, sedangkan dalam SAP ada lima standar yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan audit keuangan, standar pelaporan audit keuangan dan standar pekerjaan lapangan audit kinerja, serta standar pelaporan audit kinerja.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

5. Tanggung jawab auditor yang diatur dalam SPAP adalah memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksanya, sedangkan tanggung jawab auditor yang diatur dalam SAP adalah mengatur tentang tanggung jawab organisasi/lembaga audit.
6. Dalam SPAP diatur tentang pernyataan standar baru dan interpretasi pernyataan standar untuk menyempurnakan berbagai standar yang dikodifikasikan dalam buku SPAP, sedangkan dalam SAP masalah tersebut tidak diatur, sehingga setiap auditor mempunyai interpretasi yang berbeda-beda terhadap SAP.

Dengan adanya perbedaan diatas, mengakibatkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan audit karena standar yang dipergunakan tidak sama.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang menarik dari masalah yang timbul diatas diantaranya adalah mengapa terjadi perbedaan antara dasar auditing BPK dengan SPAP, bagaimana perlakuan BPK dengan SPAP yang ada, dan bagaimana perlakuan audit BPK terhadap beberapa perbedaan standar yang ada. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perbedaan antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Profesional Akuntan Publik terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan ?.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2. Adakah masalah-masalah audit yang timbul sebagai akibat dari perbedaan standar audit, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Profesional Akuntan Publik?
3. Bagaimanakah dampak dari perbedaan standar audit tersebut pada kinerja BPK.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Profesional Akuntan Publik terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah audit yang timbul sebagai akibat dari perbedaan standar audit, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Profesional Akuntan Publik.
3. Untuk mengetahui dampak dari perbedaan standar audit tersebut pada kinerja BPK

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan. Manfaat yang diharapkan terhadap masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

1. Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana aspek yang perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Pemeriksa Keuangan, terutama dalam meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

1.5. Identifikasi Masalah

Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi masalah-masalah serius/material yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut, juga apa atau adakah dampak pada kinerja BPK terutama pada segi opini hasil audit BPK serta apa penyebab perbedaan SAP dengan SPAP dalam perlakuan auditnya/praktek di BPK dan dampak dari perbedaan standar tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini menyajikan 5 bab yang saling berkaitan . Dalam bagian ini akan diterangkan secara singkat dari bab I sampai dengan bab V. Adapun masing-masing bab tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mendasari penelitian ini, yang terdiri dari arti Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metodologi penelitian yang berisis tentang objek penelitian, metode penelitian, jenis dan metode yang digunakan, pemilihan sample, definisi operasional variabel, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan yang terdiri dari analisis Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan uji hipotesis.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Memaparkan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan implikasinya serta saran untuk penelitian

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Auditing

2.1.1. Pengertian Audit

Pada prinsipnya auditing adalah proses penilaian terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar serangkaian kriteria. Tunggul, dalam bukunya yang berjudul *Internal Auditing (2002)* mengemukakan bahwa auditing merupakan suatu proses yang sistematis. Auditing merupakan pendekatan yang logis, mempunyai maksud, dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Auditing bukanlah proses yang tidak terencana atau serampangan. Auditing mencakup pengumpulan bukti – bukti. Bukti merupakan informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor. Sedangkan Arens dan Loebbecke, dalam *Auditing Pendekatan Terpadu (2004)* mengemukakan definisi Auditing adalah :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on degree of : correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person.

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ada. Auditing harus dilakukan oleh seorang yang kompetan dan independen.

Sedangkan menurut Kanaka & Mulyadi (2003), definisi auditing dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan sudut pandangnya, yaitu : definisi secara umum, dan definisi dari sudut pandang profesi akuntan publik.

a. Definisi secara umum, auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Definisi auditing secara umum memiliki unsur – unsur penting yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Suatu proses sistematis : maksudnya auditing merupakan suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan terorganisasi.
- 2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, maksudnya proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat individu atau badan usaha, serta mengevaluasi tanpa memihak.
- 3) Pernyataan mengenai kegiatan dan ekonomi, maksudnya hasil proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.
- 4) Menetapkan tingkat kesesuaian, maksudnya setelah bukti dikumpulkan dan di evaluasi kemudian ditetapkan tingkat kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

- 5) Kriteria yang ditetapkan, kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa : peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen, dan prinsip akuntansi yang diterima umum.
 - 6) Penyampain hasil, hasil yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk laporan audit.
 - 7) Pemakai yang berkepentingan, maksudnya pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, seperti pemegang saham, manajemen, kreditor, calon investor dan kreditor, dan kantor pelayanan pajak.
- b. Auditing dari sudut profesi akuntan publik adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian tentang bukti – bukti atas informasi keuangan suatu entitas ekonomi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran antara informasi keuangan tersebut dengan kriteria tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.1.2. Jenis – Jenis Audit

Menurut Arrens & loebbecke, sebagai diterjemahkan oleh Yusuf (2002) dan Kanaka & Mulyadi (2003), membagi audit menjadi tiga kategori, yaitu: audit atas laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

2.1.2.1. Audit atas laporan keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang disajikan oleh kliennya dinyatakan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil auditing tersebut disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan audit, dan dibagikan kepada pemakai laporan keuangan tersebut, seperti pemegang saham, kreditur, investor, dan kantor pelayanan pajak.

2.1.2.2. Audit kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan bertujuan untuk (1). menentukan apakah yang diaudit (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi (prosedur perusahaan). Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. (2). Meyakinkan apakah suatu entitas yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah telah mentaati peraturan atau hukum tertentu.

2.1.2.3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis atas setiap bagian prosedur dan metode operasi organisasi dengan tujuan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas prosedur dan metode operasi kegiatan di organisasi tersebut. Pada

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

umumnya setelah selesai audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan .

Sedangkan di tinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa di bedakan atas :

2.1.2.4. *General Audit* (Pemeriksaan umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor akuntan Publik yang Independen dan dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai SPAP dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh IAI.

2.1.2.5. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Suatu Pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audetee) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaan laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang di periksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

2.2. Profesi Akuntan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa audit dibagi menjadi 3 macam, maka akuntan sebagai subjek yang melakukan audit tersebut juga dibedakan menjadi beberapa jenis.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.2.1 Jenis – Jenis Akuntan

Arens & Loebbecke, sebagai diterjemahkan oleh Yusuf (2004) membedakan Auditor menjadi 4 jenis, yaitu :

2.2.1.1. Akuntan Publik (*External Auditor*)

Akuntan publik, dibawah naungan Kantor Akuntan Publik atau akuntan register negara, bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik, perusahaan besar, menengah, dan kecil, serta perusahaan non laba. External auditor disebut juga sebagai auditor independen.

2.2.1.2. Akuntan Pemerintahan (*Governmental Auditor*).

Akuntan pemerintah adalah auditor yang bekerja bagi pemerintah dimana pelaksanaan fungsi auditnya bertanggung jawab kepada pemerintah.

2.2.1.3. Akuntan Internal (*Internal Auditor*)

Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengaudit manajemennya bagi kepentingan direksi dan atau komisaris. Untuk beroperasi secara efektif, auditor intern harus bersikap independen didalam lini perusahaan tersebut.

2.2.1.4. Akuntan Pajak (*Tax auditor*)

Akuntan Pajak adalah auditor yang bekerja bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dimana tugas utama akuntan ini adalah memeriksa para wajib pajak apakah mereka telah memenuhi hukum pajak yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.2.2. Profesi Akuntan Publik

Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang tumbuh dan berkembang secara pesat, hal ini dapat dilihat berdasarkan pertambahan jumlah Kantor Akuntan Publik dari waktu ke waktu di Indonesia. Sebagai salah satu Profesi akuntan publik mempunyai karakteristik tertentu.

Menurut Harahap (2003) ciri – ciri profesi adalah :

- a. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
- b. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
- c. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat / pemerintah.
- d. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Bekerja bukan dengan motif komersial tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat (*social Credibility*).

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi akuntan publik sehingga akuntan berhak disebut sebagai suatu profesi. Oleh Harahap (2003), seorang akuntan publik didefinisikan sebagai berikut :

Mereka yang bekerja dibawah atap kantor akuntan publik terdaftar dengan kegiatan utamanya melakukan pemeriksaan terhadap daftar keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan maksud untuk mengeluarkan pendapat atas kewajaran daftar keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002) mendefinisikan akuntan publik sebagai berikut:

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan juga menjual jasanya sebagai konsultan pajak, konsultasi di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

Di sini perlu dibedakan istilah antara akuntan publik dengan auditor independen. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang dicatat dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Sedangkan auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berprofesi sebagai akuntan publik adalah orang yang bekerja di Kantor Akuntan Publik terdaftar dan kegiatan utamanya adalah mengaudit laporan keuangan perusahaan yang menjadi klien dan opini akuntan tersebut tidak boleh memihak orang atau badan tertentu.

Akuntan merupakan suatu profesi yang pemakiannya diatur dalam Undang Undang no.34 tahun 1954, untuk dapat berpraktek sebagai akuntan publik diperlukan izin dari Departemen Keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Memiliki gelar sarjana-Ekonomi jurusan akuntansi dari fakultas Ekonomi Universitas Negeri yang telah mendapatkan pegesahan dari Panitia Ahli Pengesahan Ijasah Akuntansi

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pclaporan Keuangan

2. Di haruskan untuk mengikuti Program Profesi Akuntansi (PPA) untuk dapat memperoleh sebutan akuntan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendrel Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Harus memiliki pengalaman kerja sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) atau BPKP paling sedikit tiga tahun.

2.3. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisai akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (SPAP:2001).

2.3.1. Kategori Kantor Akuntan Publik

Dalam melakukan berbagai aktivitas pelayanannya, masing – masing kantor akuntan publik memperkerjakan staf audit dengan jumlah yang bervariasi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik yang bersangkutan. Arens & Loebbecke (2004), membagi 4 kategori kantor akuntan publik yang ada antara lain:

- a. Kantor akuntan publik international

Kantor akuntan pada kategori ini memiliki kantor di banyak kota besar di seluruh dunia dengan jumlah karyawan termasuk staf dan partner yang sangat banyak.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

b. Kantor akuntan publik nasional

Kantor akuntan pada kategori ini memiliki cabang – cabang diseluruh kota besar. Selain itu juga memiliki hubungan dengan kantor akuntan di luar negeri sehingga memiliki juga potensi international.

c. Kantor Akuntan publik lokal dan regional

Kantor akuntan pada kotegori ini banyak sekali terdapat di Indonesia, dan terpusat di Pulau Jawa. Beranggotakan lebih dari 30 orang tenaga profesional, mereka hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya. Kantor akuntan ini juga bersaing dengan kantor akuntan publik international dan nasional sehingga banyak diantaranya yang berafiliasi denga kantor akuntan publik asing.

d. Kantor akuntan Publik lokal dan kecil

Kantor akuntan pada kategori ini memiliki kurang dari 25 orang tenaga profesional pada satu kantor. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang lainnya bagi badan – badan usaha kecil, organisasi nirlaba, maupun perusahaan yang sudah go publik.

2.3.2. Jasa – Jasa yang diberikan oleh KAP

Kantor Akuntan Publik memberikan jasa, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan no. 423/KMK.06/2002 sebagai berikut :

2.3.2.1. Jasa Atestasi .Jasa Atestasi termasuk audit umum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik, Audit Kinerja dan audit khusus.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.3.2.2. Akuntan Publik dan KAP dapat memberikan jasa non astestasi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Meliputi jasa konsultasi, jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.

2.4. Pengertian Independensi Akuntan Publik

Konrath (2003) mendefinisikan independensi auditor berarti auditor bekerja untuk melayani kepentingan dari pemakai laporan keuangan sehingga harus terbebas atau independen terhadap manajemen. Arens (2004) mendefinisikan independensi sebagai cara pandang yang tidak memihak didalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil audit. Lebih lanjut dikenal dua macam independensi yaitu *independence in fact* (auditor secara nyata mampu untuk menjaga attitude yang tidak bias) dan *independence in appearance* (interpretasi oleh pihak lain terhadap independensi auditor) namun, final report dari *independence Standard Boards* (ISB) dan kode etik IFAC mengklasifikasikan independensi menjadi *independence of mind* (bebas dari pengaruh ancaman / threats terhadap independensi yang akan menyebabkan berkurangnya obyektivitas) dan *independence in appearance* (ketiadaan aktivitas, hubungan dan hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan investor yang rasional menyimpulkan terapat “*unacceptably high risk*” bahwa auditor tidak independen *mind*).

Sejalan dengan ISB, AICPA menyatakan independence berkaitan dengan state of mind auditor. Dan dalam the AICPA’s Code of profesional Conduct Artikel IV menyatakan bahwa anggotanya harus menjaga obyektivitas dan bebas

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

dari conflicts of interest dalam melaksanakan tanggung jawab profesional serta independence in fact and apperarance ketika melakukan jasa audit dan attestasi yang lain. Prinsip tersebut menekankan pada netralitas, kejujuran intelektual (*intellectually honest*), dan bebas dari konflik kepentingan, sebagaimana yang dinyatakan oleh IAI pada Standar Auditing (SA) seksi 220 paragraf 02.

2.5. Tujuan Independensi Akuntan Publik

Tujuan independensi auditor yang dinyatakan dalam *final report* ISB yaitu untuk mendukung atau meningkatkan tingkat keyakinan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya terhadap proses pelaporan keuangan dalam rangka optimalisasi alokasi modal. Fokus dari tujuan ini adalah bahwa independen merupakan salah satu aspek dari kualitas audit, dimana audit akan memperbaiki keandalan dan meningkatkan kredibilitas proses pelaporan keuangan sehingga dihasilkan pelaporan keuangan yang andal dan kredibel. Jika auditor bebas dari bias tetapi investor dan pengguna lainnya tidak mempercayai independensinya, audit tidak akan meningkatkan kredibilitas informasi keuangan sehingga investor dan pengguna lainnya menjadi tidak mengandalkan informasi keuangan audited. Bagaimanapun pembuat keputusan tidak akan membuat keputusan yang hanya didasarkan pada kredibilitas informasi keuangan tetapi menurunkan tingkat kepercayaannya.

Kinney (2001) menyatakan adanya dua cara pandang atas independensi auditor, terdiri dari :

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

- a. *Constraint View*, yaitu perlunya pemaksaan (*constraint*) secara eksternal oleh regulator misalnya SEC atau AICPA karena auditor mungkin mencoba untuk melakukan manuver atau hanya untuk memenuhi paksaan/peraturan dari regulator. Menurut pandangan ini regulator menghadapi permasalahan yaitu munculnya kesenjangan (*gap*) antara konteks yang baru dengan peraturan yang ada sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penurunan obyektivitas.
- b. *Core Value View*, yaitu memandang independensi sebagai salah satu komponen nilai dari individu auditor dan reputasi kolektif yang menjadi pusat nilai pasar mereka (*markets value*) sehingga auditor mencoba mengembangkan, menjaga, dan mengeksploitasi nilai inti (*core value*) ini. Menurut pandangan ini maka terdapat kebebasan bagi auditor atau KAP untuk mengembangkan kebijakannya sendiri dalam menentukan tingkat independensinya dengan mengembangkan cara yang efektif dan efisien guna menjaga dan meningkatkan reputasi independen untuk mencapai kesejahteraan.

Risiko independensi yaitu kemungkinan obyektifitas auditor (1) dikompromikan atau (2) akan nampak dikompromikan menurut investor rasional dan pemakai laporan keuangan lainnya. Pemahaman atas risiko independensi dapat dilihat dalam kerangka analisis pada Gambar 2.1, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

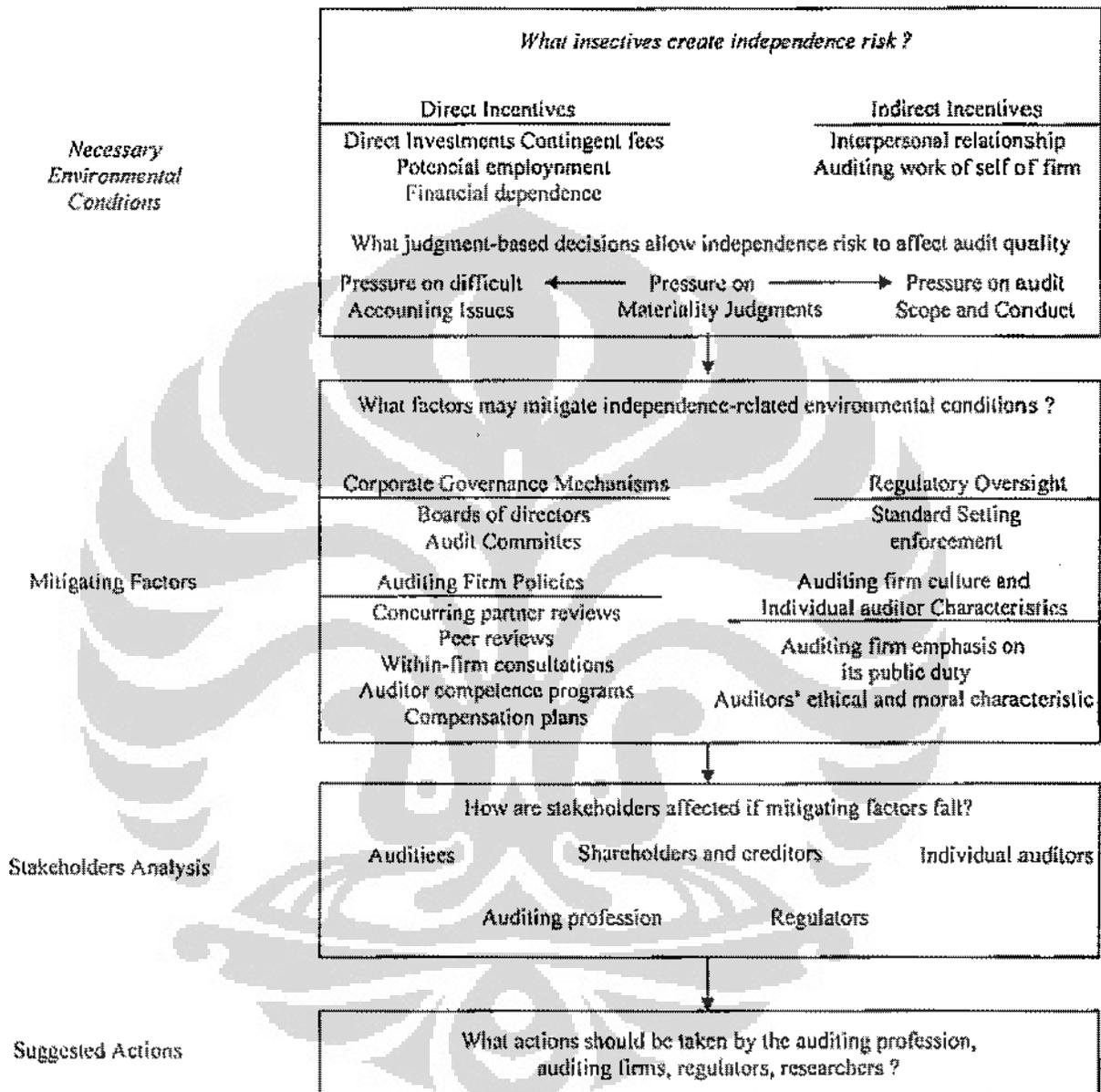
Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

a. Insentif yang menyebabkan risiko independensi

Insentif yang dapat menciptakan terjadinya risiko independensi dapat dibagi menjadi insentif langsung dan tidak langsung. Insentif langsung melibatkan manfaat keuangan (moneter) baik aktual atau potensial, maupun adanya potensial manfaat yang dapat diambil. Misalnya investasi dalam surat berharga klien atau reksadana, fee kontinjen, potensial menjadi karyawan klien, dan ketergantungan keuangan yang dapat meliputi sumber, besaran secara kreatif, keberlangsungan *fee*, *lowballing effect*, serta hubungan yang dapat meningkatkan reputasi dengan klien yang berharga (*high-profile client*). Insentif tidak muncul dari kondisi lain yang dapat menyulitkan auditor bertindak obyektif. Misalnya terjadi jika ada hubungan pribadi atau keluarga atau profesional dengan klien, ketika auditor memeriksa hasil kerja sendiri termasuk mempersiapkan laporan keuangan, merekomendasikan penilaian bagi pos-pos dalam laporan keuangan seperti ini *process research and development*, *outsourcing jasa internal audit*, dan menyarankan keputusan manajemen.

Gambar 2.1

A Framework for Understanding the antecedents and Consequences of Independence Risk



Sumber: Karla M. Johnstone, Michael H. Sutton, and Terry D. Warfield. 2001. Antecedents and consequences of Independence Risk: Framework for analysis. USA: Accounting Horizons, pg 4

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Selain kedua insentif tersebut, auditor juga menghadapi berbagai keputusan yang didasarkan pada pertimbangan (*judgement-based decisions*) yang mengakibatkan risiko independensi dan mempengaruhi kualitas audit. Terdapat 3 (tiga) kategori judgement-based decisions yang dapat mempengaruhi risiko independensi yaitu:

- Isu akuntansi yang sulit (*difficult Accounting issues*), yaitu memungkinkan interpretasi alternatif, meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang mensyaratkan estimasi signifikan atau kriteria pengukuran alternatif seperti pembentukan cadangan penilaian atau kewajiban restrukturisasi yang diestimasi.
- Keputusan pelaksanaan audit (*audit-conduct decisions*), yaitu pertimbangan mengenai sifat dan luasnya bukti audit. Masalah yang dapat timbul mengenai keputusan ini adalah seorang auditor dapat mengkompromikan sifat dan luas dari bukti audit yang dikumpulkan karena insentif yang berhubungan dengan independensi.
- Keputusan materialitas (*materiality decisions*), yaitu pertimbangan mengenai besarnya kelalaian atau salah saji dari informasi keuangan yang akan mengurangi pertimbangan atas keandalan penggunaan laporan keuangan. Fokus mengenai hal ini adalah auditor mungkin tidak menyimpulkan secara benar suatu pos (item) adalah tidak material (inmaterial), dan kemudian tidak melakukan evaluasi atau penyesuaian selama pelaksanaan audit.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

b. Faktor-faktor yang dapat menurunkan risiko independensi.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko independensi atas kondisi lingkungan yang ada yaitu:

- *corporate governance* (tata kelola perusahaan) dan *regulatory oversight*.

Keduanya merupakan mekanisme institusional yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan keandalan kepada pihak ketiga bahwa risiko independen telah dikendalikan. Mekanisme *corporate governance* meliputi keterlibatan dewan komisaris dan komite audit dalam mengawasi pelaksanaan audit. Sementara itu, regulator memainkan peranan yang besar terhadap pembentukan *governance standard* (standar pengelolaan). Misalnya penggabungan kegiatan dari SEC, ISB, AICPA, dan Blue Ribbon Committee yang memfokuskan pada perbaikan efektifitas komite audit dan pengungkapan informasi kepada publik atas aktivitas komite audit.

- Kebijakan KAP

Kebijakan yang dibentuk oleh profesi auditing, KAP, dan individual auditor setidaknya dapat mengurangi risiko independensi karena terkait dengan litigasi dan penurunan reputasi (Davis dan Simon 1992, Palmrose 1998). Contoh dari kebijakan KAP untuk menginginkan risiko independensi adalah review terhadap partner yang terkait dalam kontrak, peer reviews, konsultasi didalam KAP, program kompetensi auditor dan rencana kompensasi.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

- Budaya KAP dan karakteristik pribadi auditor.

Budaya KAP baik secara eksplisit maupun implisit dan karakteristik etika individu auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko independensi. Terdapat 3 (tiga) tipe budaya KAP yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2.
Continuum of auditing Firm Culture



Sumber: Karla M. Johnstone, Michael H. Sutton, and Terry D. Warfield. 2001. Antecedents and consequences of Independence Risk: Framework for analysis. USA: Accounting Horizons, pg 4

Tipe 1- Budaya Wakil Publik (*Public Duty Culture*), menekankan tugas auditor untuk pemberi modal (*capital provider*), meliputi investor dan kreditur, dengan cara memberikan kepercayaan kepada capital providers bahwa informasi yang mereka terima dapat diandalkan (*reliable*) dan tidak menyesatkan. Dengan adanya bentuk kepentingan antara pencari modal (*capitalseekers*) dengan capital providers, dengan mengurangi informasi metris antara capital seekers dan *capital providers*.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Tipe 2 – Budaya Manajemen Risiko (*risk management culture*), mendorong auditor untuk memandang dirinya sendiri sebagai rekan usaha dengan kliennya, *capital seekers*. Risk Manajemen *Culture* memfokuskan pada kepentingan auditor dan bagaimana terhadap risiko terhadap auditor terjadi dari penyajian yang dikelola dan dikendalikan.

Tipe 3 –Budaya Advokasi Klien (*Client Advocacy Culture*). Budaya KAP biasanya berinteraksi dengan karakteristik auditor individual, khususnya karakteristik etika dan moral (panemon 1992). Seorang auditor dengan standar etika yang tinggi dan memiliki moral yang teliti dikembangkan, jika beroperasi pada KAP dengan klient *advocacy culture* maka kemungkinan masih dapat secara efektif mengurangi risiko independence, tetapi pengurangan risiko independensi; tetapi pengurangan risiko tersebut nampak kurang menantang pada KAP dengan *publicduty culture*.

- c. Pengaruh terhadap pihak terkait (*stakeholders*) jika faktor-faktor yang menurunkan risiko independensi gagal.

Risiko independensi yang terjadi memiliki pengaruh nilai kepada berbagai *stakeholders* (klien, pemegang saham, kreditur, individual auditor, profesi audit, dan regulator).

- Dalam jangka pendek, klien dapat memperoleh keuntungan dengan peningkatan harga saham dan rendahnya biaya modal (*cost of capital*), karena auditor akan menyesuaikan laporan keuangan sesuai kebutuhannya.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

- Dalam jangka panjang, kurangnya independensi auditor yang dihubungkan dengan salah saji oleh auditees, dapat menurunkan premi *cost-of-capital* oleh investor atau kreditur karena meningkatnya risiko informasi dari ketidakpercayaan pada proses audit. Secara umum, semakin meningkatnya risiko independensi membuat audit menjadi berkurang nilainya bagi pemegang saham dan kreditur. Ini karena independensi merupakan hal yang penting terhadap kemampuan auditor untuk menambahkan kredibilitas laporan keuangan.

d. Tindakan yang harus dilakukan oleh profesi auditing, KAP, regulator, dan para peneliti.

1) Profesi auditing.

Profesi auditing secara aktif telah membahas risiko independensi, terutama mengenai larangan kegiatan tertentu misalnya *rules of conduct* dari AIPCA dan program pengendalian mutu institusi. Namun terdapat dua hal yang kurang diperhatikan oleh profesi yaitu:

- profesi tidak sepenuhnya membahas isu ketergantungan keuangan yang terkait dengan sumber, besaran secara relatif, keberlangsungan *fee*, *lowballing effect*, dan nilai reputasi atas hubungan dengan suatu kesuksesan, profil klien yang tinggi. Kenyataannya, profesi terlihat hanya mengejar perluasan strategi jasa yang dapat meningkatkan ketergantungan, dan
- profesi harus meningkatkan perhatiannya pada keputusan yang bersifat judgement-based yang mempengaruhi kualitas audit misalnya melalui

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

peningkatan *accounting standard setting* secara aktif untuk menyelesaikan isu-isu akuntansi dan mengurangi ketidakjelasan praktek karena tidak diatur secara jelas dalam standar.

2) KAP

- menyusun kebijakan dan budaya KAP yang mendukung usaha auditor dalam mengurangi risiko independensi misalnya memberikan nilai dan penghargaan secara profesional, mengutamakan kewajiban auditor sebagai *public duty*, dan mensosialisasikannya dengan tepat.
- Lebih aktif melatih tenaga profesionalnya dalam mengidentifikasi masalah risiko independensi. Pelatihan tidak hanya mengenai pengetahuan teknis, tetapi juga skill dan taktik negosiasi yang efektif.
- Mempertimbangkan dan mengintegrasikan temuan-temuan riset tentang struktur kompensasi yang mempengaruhi keputusan auditor. Kriteria evaluasi, penerimaan dan promosi seharusnya dibangun untuk mendukung kebijakan KAP yang dapat mengurangi risiko independensi.

3) Regulator

- Menerbitkan peraturan baru dan menjadikan independensi sebagai topik utama dalam berbagai pertemuan seperti yang dilakukan SEC, POB, AICPA dan ISB.
- Memutuskan pada peningkatan visibilitas dari regulasi, efektivitas corporate governance dan mekanisme *self-regulatory*, serta pembuatan peraturan mengenai insentif yang dapat meningkatkan risiko

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

independensi serta memfokuskan pada keputusan yang bersifat *judgement-based* yang memungkinkan adanya risiko independensi dan mempengaruhi kualitas audit.

4) Peneliti

- peneliti harus terus menemukan setiap komponen yang dapat mempengaruhi kerangka dasar (*framework*). Seperti penelitian bagaimana auditor memecahkan situasi keputusan yang berdasarkan penilaian dengan klien mereka yang mengandung isu-isu akuntansi yang sulit dan keputusan mengenai materialitas yang sangat dibutuhkan.
- Penelitian terhadap beberapa bagian dari *framework* masih terbatas. Misalnya, penelitian terhadap pengaruh insentif dari ketergantungan keuangan telah dilakukan dengan baik, tetapi insentif lainnya seperti hubungan personal dan potensial pemerkerjaan telah mendapat perhatian yang lebih sedikit.
- Efektifitas dari faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko independensi belum digali secara mendalam secara akademis.
- Riset dimasa depan harus memeriksa hubungan antara komponen-komponen dari kerangka dsar risiko independensi khususnya bagaimana insentif langsung atau tidak langsung berhubungan dengan keputusan *judgement-based*, memahami bagaimana dampak dari insentif dan keputusan yang *judgement-based* berhubungan dengan

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

faktor yang mengurangi risiko independensi dan memahami bagaimana pengaruhnya terhadap stakeholder jika faktor-faktor tersebut gagal.

Menurut IFAC, terdapat empat risiko yang dapat merusak independensi akuntan yaitu :

- a. risiko kepentingan sendiri (*self interest risk*). Terjadi karena akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan dengan klien, misalnya adanya kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, kepentingan pinjaman, ketergantungan fee, dan lain-lain.
- b. Risiko review sendiri (*self review risk*). Terjadi karena dua hal, yaitu (1) akuntan melakukan penugasan pemberian jasa keyakinan (*assurance services*) yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien, dan (2) akuntan melakukan jasa lain yang mengarah pada produk/pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. Misalnya menjadi direksi/karyawan klien, ikut menyiapkan dokumen sumber untuk membuat laporan keuangan dan lain-lain.
- c. Risiko advokasi (*advokasi risk*). Terjadi karena akuntan menjadi terlalu erat kaitannya dengan kepentingan klien. Misalnya menjadi promotor/dealer atas saham/efek klien, mewakili klien dalam hubungan dengan regulator, menjadi advokat klien dengan pihak ketiga dan lain-lain.
- d. Risiko pengaruh klien (*client influence risk*). Terjadi karena akuntan memiliki hubungan yang erat dengan klien termasuk hubungan pribadi yang dapat menyebabkan intimidasi oleh atau keramahan klien yang

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

berlebihan dengan klien. Misalnya memiliki anggota keluarga langsung (immediate family) atau family dekat (close relatif) yang bekerja pada klien, mantan partner, adanya hubungan yang lama, dan lain-lain.

Sedangkan pengaman (*saffeguards*) yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya risiko independensi ke tingkat yang dapat diterima, menurut IFAC adalah:

- a. Pengamanan yang dibentuk oleh profesi. Misalnya persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman untuk mendapatkan izin praktek/anggota profesi, pendidikan profesional berkelanjutan, review eksternal atas pendekatan mutu KAP, dan lain-lain.
- b. Pengamanan dalam entitas klien yang menjadi obyek penugasan. Misalnya menunjukkan akuntan publik oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) atau komite audit, jumlah staf profesional yang kompeten, prosedur pengendalian intern yang bagus, structure corporate governance yang memadai, dan lain-lain.
- c. Pengamanan dalam sistem dan prosedur akuntan publik yang bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap independensi, yang mencakup satu atau lebih hal-hal berikut:
 - kebijakan dan prosedur yang mengidentifikasi kepentingan atau hubungan antara akuntan publik dengan klien, dan
 - pemberian keyakinan bahwa staf dapat berkomunikasi dengan tingkat yang lebih tinggi dan lain-lain.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.6. Pengaturan Tentang Independensi Akuntan Publik

Pernyataan standar auditing (PSA) No. 04 SPAP SA Seksi 220 menyatakan bahwa independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara obyektif. Hal ini senada dengan pernyataan Mahmud (2001) yang menyatakan bahwa independensi adalah *state of mind* yang tidak bisa diatur. Independensi menyangkut kemampuan untuk bertindak obyektif dan dengan penuh integritas, sehingga hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang secara psikologis dan intelektual, jujur. Penilaian terhadap independensi terbatas pada evaluasi terhadap penampilan (*appearance*), terhadap cara dan hasil kerja yang dilakukan oleh akuntan.

Untuk tujuan praktis, seorang akuntan publik harus bebas dari hubungan-hubungan yang memiliki potensi untuk menimbulkan bias. Anggota profesi harus dapat menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pengaturan telah dibuat oleh pemerintah maupun profesi sebagai regulator dimana profesi tersebut berpraktek, untuk memberikan keyakinan kepada para stakeholders jasa akuntan publik bahwa akuntan publik telah menjalankan profesinya secara independen dan profesional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka menjaga kualitas jasa yang diberikan dan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan. Berikut ini akan diberikan gambaran singkat mengenai pengaturan independensi yang telah dibuat oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan IFAC.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Indonesia

Pengaturan independensi publik di Indonesia telah diberikan oleh pihak organisasi profesi (IAI) dan pemerintah. Beberapa peraturan yang telah ada yaitu:

a. IAI, meliputi:

- SPAP SA Seksi 220 (PSA No. 04)
- Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (AE-KAP) No. 101
- SPAP Standar Pengendalian Mutu Kompartemen Akuntan Publik (SPM KAP) Seksi 100, 200, dan 300

b. Pemerintah, meliputi:

- Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 20/PM/2002, Peraturan No. VIII. A.2
- Peraturan Bapepam tentang Pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit bagi perusahaan Publik
- Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 423/KMK. 06/2002

Secara umum, peraturan-peraturan tentang independensi akuntan publik di Indonesia yang berlaku saat ini masih bersifat global atau umum. PSA No. 04 dan Aturan Etika No. 101 tidak memberikan penjelasan rinci tentang hal-hal atau kondisi-kondisi yang tidak boleh terjadi atau dilakukan akuntan publik dalam kaitannya dengan pemberian jasa profesional agar dapat memelihara independensinya. Exposure draft dari interpretasi Aturan Etika No. 101 sebenarnya telah memberikan penjelasan yang lebih detil sebagai panduan bagi akuntan publik berkaitan dengan aspek independensi, misalnya independensi yang *Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan*

berkaitan dengan transaksi, kepentingan, dan hubungan keuangan dari akuntan publik; independensi berkaitan dengan mantan praktisi KAP dan mantan karyawan klien; independensi berkaitan dengan jasa non attestasi yang diberikan; dampak hubungan keluarga dengan independensi; dan lain-lain. Namun, interpretasi tersebut sampai dengan saat ini belum disahkan sehingga secara resmi belum diberlakukan dan mengikat akuntan publik. Sementara itu, peraturan independensi pada SPM KAP seksi 100, 200, dan 300 yang ada, lebih cenderung memberikan pengaturan bagi para pe-review agar dapat menjaga independensinya dalam rangka pengendalian mutu melalui peer review.

Peraturan pemerintah tentang independensi akuntan publik, terutama diterbitkan oleh departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap efektifitas dan kelangsungan hidup pasar modal Indonesia, telah menerbitkan keputusan No. Kep-20/PM/2002 serta instruksi pembentukan komisar independen dan komite audit dalam rangka menjaga independensi akuntan publik yang memberikan jasa kepada perusahaan masuk bursa. Pada keputusan ketua Bapepam tersebut telah dimulai diberikan pedoman-pedoman yang lebih jelas mengenai hal-hal yang dilarang oleh akuntan publik, misalnya terkait dengan hubungan pekerjaan, kepentingan keuangan, hubungan usaha, pemberian jasa-jasa non-audit, penentuan fee profesional, dan pembatasan periode penugasan. Hal ini juga telah dilakukan pada pembuatan Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yang sampai sekarang belum disahkan. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan KMK No. 423/KMK.06/2002 yang terakhir diubah dengan KMK. No. *Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan*

359/KMK.06/2003 sebagai wujud perhatian pemerintah dalam mendukung terwujudnya jasa akuntan publik yang profesional. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, dalam KMK tersebut dinyatakan secara tersirat pengaturan untuk menjaga independensi akuntan publik, seperti pembatasan periode penugasan dan sanksi-sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran.

Amerika Serikat

Pengaturan independensi di Amerika Serikat juga dilakukan oleh pihak profesi (AICPA) maupun pemerintah, yaitu:

a. AICPA, meliputi:

- Generally Accepted of Auditing Standards (GAAS) Section 310
- Code of Profesional Conducts Sectio 101
- Interpretations under Rules 101

b. Pemerintah, meliputi:

- SEC File No. S7-13-00
- Sarbanes-Oxley Act 2002

Pada tahun 1997, AICPA dan SEC telah bersepakat membentuk suatu badan dengan nama Independence Standard Boards (ISB) yang bertugas untuk melakukan riset, pengembangan standar dan melakukan suatu analisa, dan debat publik mengenai isu independensi auditor. ISB akhirnya dibubarkan pada bulan Juli 2001, tetapi banyak dari hasil pekerjaannya telah diadopsi kedalam SEC Rules maupun AICPA's Profesional Ethics Executive Committee, misalnya komunikasi antara komite audit dengan auditor, pengaruh investasi keuangan

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

tertentu, dan mantan praktisi KAP yang bekerja pada klien dalam kaitannya dengan isu independensi auditor.

Di Amerika Serikat, peraturan tentang independensi akuntan publik didominasi oleh AICPA dan SEC. peraturan yang dibuat dikenal bersifat rule based, sehingga lebih detil dan cenderung kaku. Secara umum, sifat pengaturan ini lebih menguntungkan auditor, karena telah diberikan panduan secara lengkap dan jelas mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan dilarang oleh akuntan dalam mempertahankan independensinya. SEC sendiri tidak menyetujui pendekatan ancaman dan pengamanan (threats and safeguards approach) dalam menganalisa isu independensi pada saat ISB hendak membuat suatu kerangka mengenai independensi, yang mana sejalan dengan IFAC dan Federation des Experts Comptables European (FEE). Kontroversi tersebut telah diungkap oleh Glazer dan Jaenicke (2002) yang menyatakan bahwa SEC memandang pendekatan tersebut akan memberikan peluang bagi KAP dan Auditor individu untuk menentukan sendiri tingkat independensinya, karena pendekatan tersebut tergantung dari firm self analysis dan self review (rely in their assesment). SEC berpendapat bahwa independensi seharusnya dijamin secara konsisten dan diatur dengan peraturan yang seragam.

Pada tahun 2002, Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act sebagai respon atas terjadinya skandal akuntansi Enron yang sempat mengguncang perekonomian dalam negerinya. Undang-undang tersebut diharapkan dapat memperbaiki profesionalisme dan kualitas jasa dari akuntan publik, serta dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat atas profesi akuntan.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Pada title II dari Sarbanes-Oxley Act, diatur mengenai independensi auditor yang juga telah diadopsi menjadi SEC Rules pada bulan Januari 2003. antara lain mengatur mengenai jasa non-audit yang boleh diberikan, pembatasan periode penugasan akuntan, persetujuan pendahuluan yang harus diberikan oleh komite audit atas semua jasa dari akuntan, pengungkapan fee dalam laporan tahunan, dll.

Standar Internasional (IFAC)

IFAC adalah organisasi akuntan internasional yang dibentuk dengan tugas utama memusatkan perhatian pada masalah-masalah pemeriksaan akuntan, akuntansi manajemen, dan penyelenggaraan konggres internasional akuntan, yaitu dalam rangka semangat proses konvergensi standar untuk membentuk standar internasional. Dengan memperhatikan adanya perbedaan kondisi ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lain-lain yang melingkupi proses pembuatan standar akuntansi dan standar auditing, IFAC berusaha untuk dapat menciptakan satu standar yang dapat berlaku secara internasional di berbagai negara. Standar yang diterbitkan IFAC dikenal lebih bersifat principle based, sehingga masih fleksibel karena hanya mengatur hal-hal yang prinsip atau pokok saja.

IFAC telah menerbitkan Code of Ethics for profesiona Accountants untuk dapat diaplikasikan oleh akuntan yang berpraktek secara internasional. Termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang independensi akuntan publik yang diatur pada part B section 8. Pada prinsipnya pembuatan aturan kode etik IFAC mengenai indpendensi ini adalah bertujuan untuk membantu KAP dan anggota tim penugasan dalam:

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

- mengidentifikasi ancaman-ancaman terhadap independensi
- mengevaluasi apakah ancaman-ancaman tersebut jelas signifikan, dan
- jika ancaman tersebut signifikan, maka mengidentifikasi dan mengaplikasikan pengaman (safeguards) yang tepat untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman ketingkat yang dapat diterima.

Dalam situasi ketika tidak ada pengaman yang tersedia untuk mengurangi ancaman ketingkat yang dapat diterima, satu-satunya tindakan adalah mengeliminasi aktivitas atau kepentingan (interest) yang menciptakan ancaman, atau menolak untuk menerima/ melanjutkan penugasan. Jadi, akuntan publik diperbolehkan untuk melakukan langkah alternatif sebagai pengaman atas suatu kondisi yang mengancam independensi sebelum akhirnya memutuskan untuk menolak atau tidak melanjutkan suatu penugasan. Kode etik IEAC ini telah memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan akuntan publik terhadap kondisi yang mengancam independensi yang diatur pada Section 8.100 s.d 8.211, misalnya terkait dengan kepentingan keuangan (financial interest), pinjaman dan jaminan, hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, hubungan pribadi/yang lama, jasa-jasa non-astetasi, penentuan fee dan pricing, pemberian (gift) dari klien, dan adanya ancaman litigasi.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.7. Pentingnya Independensi Akuntan Publik

Hasil penelitian Widagdo, dkk (2002) menunjukkan bahwa manajemen memiliki harapan atas kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Financial Accounting Standard Committee (FASC) dari American Accounting Association (2000) bahwa: *good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement user' perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.* Manajemen atau klien akan puas jika audit yang dilakukan oleh akuntan publik memiliki kualitas yang baik. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan akuntan publik, akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Pertanyaan tentang kualitas audit yang dilakukan akuntan publik oleh masyarakat bertambah besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Independensi adalah sangat fundamental bagi auditor, sehingga di Amerika Serikat telah dibentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang anggotanya diangkat oleh SEC dengan tugas antara lain menetapkan standar independensi serta mengenakan sanksi indisipliner terhadap akuntan yang melanggar. Profesi akuntan dianggap sebagai salah satu penyebab kejahatan kerah putih. Belajar dari kasus Enron di Amerika Serikat, *Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan*

bahwa profesi akuntan yang independen seharusnya berpihak kepada publik, kenyataannya bisa berbalik, berpihak kepada pemberi tugas. Penyidikan yang dilakukan oleh SEC menemukan bahwa laporan keuangan Enron tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Investigasi yang dilakukan oleh peradilan Amerika menunjukkan bahwa akuntan publik terlibat dalam pemusnahan dokumen pendukung kasus tersebut, sehingga akhirnya Arthur Andersen sebagai auditor independen Enron dicabut izin prakteknya. Auditor dituntut mempertahankan independensinya *in fact and in appearance* agar opininya, konklusi, pertimbangan (judgement), serta rekomendasinya netral menurut persepsi publik. Berdasarkan riset yang dikumpulkan, FASC dari American Accounting Associations (AAA) menyimpulkan bahwa antara lain bahwa keputusan dan pertimbangan auditor dipengaruhi dorongan untuk menahan penugasan audit. Riset juga membuktikan bahwa auditor tidak secara sistematis menetapkan fee audit lebih rendah dengan maksud untuk memperoleh penugasan nonaudit dari klien audit mereka. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntans publik.

Dalam *blue-print* Pasar Modal Indonesia 200-2004 disebutkan bahwa akuntan dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Akuntan merupakan profesi yang sangat berperan dalam mendorong terciptanya prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal. Hal tersebut dilakukan melalui pengungkapan informasi keuangan perusahaan dan pemberian pendapat mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Disamping itu akuntan juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi. Dalam hal ini akuntan perlu mendorong perusahaan mengungkapkan informasi material yaitu informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek diperusahaan.

2.8. Persepsi Akuntan Publik Terhadap Independensi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan Sihwahjoeni dan Gudono (2001) mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya. Melalui panca inderanya. Persepsi akuntan publik terhadap independensi dapat diartikan sebagai proses bagaimana akuntan publik memandang nilai-nilai atau kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi independensinya atau kehilangan persepsi independensi dari masyarakat.

Suatu norma tertentu dapat memiliki nilai yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena standar seseorang itu berbeda-beda. Dalam penelitian ini, selain diberikan pembahasan mengenai kondisi pengaturan independensi di *Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan*

Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, juga akan dilakukan penelitian empiris mengenai bagaimana persepsi auditor KAP terhadap kondisi pengaturan yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi. Adanya faktor-faktor seperti kesenjangan ragam jasa, kesenjangan persaingan intraprofesional, dan kesenjangan ambiguitas peran, dapat menyebabkan perbedaan persepsi diantara auditor yang bekerja pada KAP besar, menengah, dan kecil.

Kesenjangan dalam ragam jasa yang ditawarkan, timbul karena dugaan adanya konflik jasa asetasi yang diberikan auditor independen dengan jasa-jasa lain yang ditawarkan KAP. Kesenjangan ini cenderung melebar sebagai akibat dari perubahan lingkungan pasar sehingga memaksa kantor-kantor akuntan publik, terutama yang besar, untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman akibat intensifikasi regulasi pemerintah, peningkatan tanggung jawab hukum, dan perubahan teknologi. Demi mempertahankan keunggulan daya saing, perubahan lingkungan pasar tersebut harus ditanggapi oleh kantor akuntan publik, terutama yang bersekala besar, melalui transformasi visi, misi dan strategi, serta adaptasi kedalam kultur, struktur, dan sistem organisasi.

Peningkatan cost of self-regulation dalam jasa audit eksternal, memaksa KAP untuk melakukan diversifikasi usaha yaitu dengan menawarkan jasa-jasa baru seperti personal financial planning, risk management, litigation support, corporate finance, dan appraisal services; disamping jasa konsultasi manajemen yang telah ada. Diversifikasi jasa dengan risiko yang lebih kecil dari jasa asetasi mempengaruhi service mix sehingga aktivitas semakin menyimpang dari core

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

services yang tradisional. Dewasa ini usaha KAP telah bergeser dari jasa audit ke konsultasi manajemen. Sebagai akibat dari perubahan service mix ini orientasi ke strategis bisnis tampaknya tak terhindarkan. Kebijakan harga pun diterapkan sehingga tidak jarang jasa audit ditawarkan dengan potongan harga yang lebih besar agar dapat menarik nasabah untuk memanfaatkan jasa konsultasi dengan risiko yang lebih kecil dan tarif yang mahal. Kalau dalam organisasi kantor akuntan publik jasa audit merupakan profit center yang mandiri, tidak tertutup peluang bahwa tarif yang murah tersebut akan dikompensasikan dengan menurunnya kualitas audit.

Kesenjangan dalam persaingan intraprofesional, menyangkut konflik yang timbul akibat perilaku persaingan di antara kantor akuntan publik. Keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan daya saing memaksa kantor akuntan publik untuk berpaling dari strategi profesional ke strategi bisnis yang sering diorientasikan pada tujuan (meraih laba sebesar-besarnya) menghalalkan segala cara. Sebagai contoh, kalau seorang nasabah berkepentingan dengan audit opinion atau expert opinion seseorang akuntan, dia dengan mudah dapat mencari akuntan lain untuk memberikan opini alternatif dengan harga cocok.

Kesenjangan ambiguitas peran, menyangkut konflik antara nilai dengan norma yang diproyeksikan kantor-kantor akuntan bagi para staf profesional dan persepsi para staf profesional mengenai nilai dan norma tersebut. Konvergensi antara dua sistem nilai ini sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi karena ambiguitas peran cenderung memacu konflik peran (role conflict) dan selanjutnya kedua variabel ini secara signifikan berkaitan dengan persepsi para

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

auditor senior mengenai iklim organisasi dan keputusan serta ketegangan kerja. Berbagai studi juga mengkonfirmasi dampak potensial dari ambiguitas dan konflik peran ini terhadap stres, turnover, dan kinerja suboptimal yang sangat merugikan organisasi.

Hasil riset Lennox (2002) mengenai "opinion shopping" oleh auditor dan peran komite audit didalamnya, menemukan bahwa kantor akuntan publik besar ("Big Four") melaksanakan audit dengan lebih kredibel dibanding kantor akuntan publik kecil secara umum. Namun demikian, dalam hal "opinion shopping", perbedaan ukuran perusahaan tersebut tidak menjadi pembeda terjadinya pemberian "opinion shopping" kepada klien. Hanya ia mencatat bahwa kantor akuntan publik kecil dan menengah ("Non Big Four") lebih sering melakukan "opinion shopping" dibanding dengan kantor akuntan publik besar.

2.9. Kerangka Pemikiran

Independen itu sendiri tercermin dalam 2 hal, yaitu independen secara fakta dan secara penampilan. Independen dari segi fakta diwujudkan dalam diri auditor yang mampu mempertahankan sikap mental untuk tidak memihak dalam pelaksanaan audit, ini bersumber dari kejujurannya dalam mempertimbangkan fakta yang ada dan membuat keputusan secara objektif. Sedangkan Independen dalam penampilan adalah tergantung pada penafsiran pihak lain tentang independensinya.

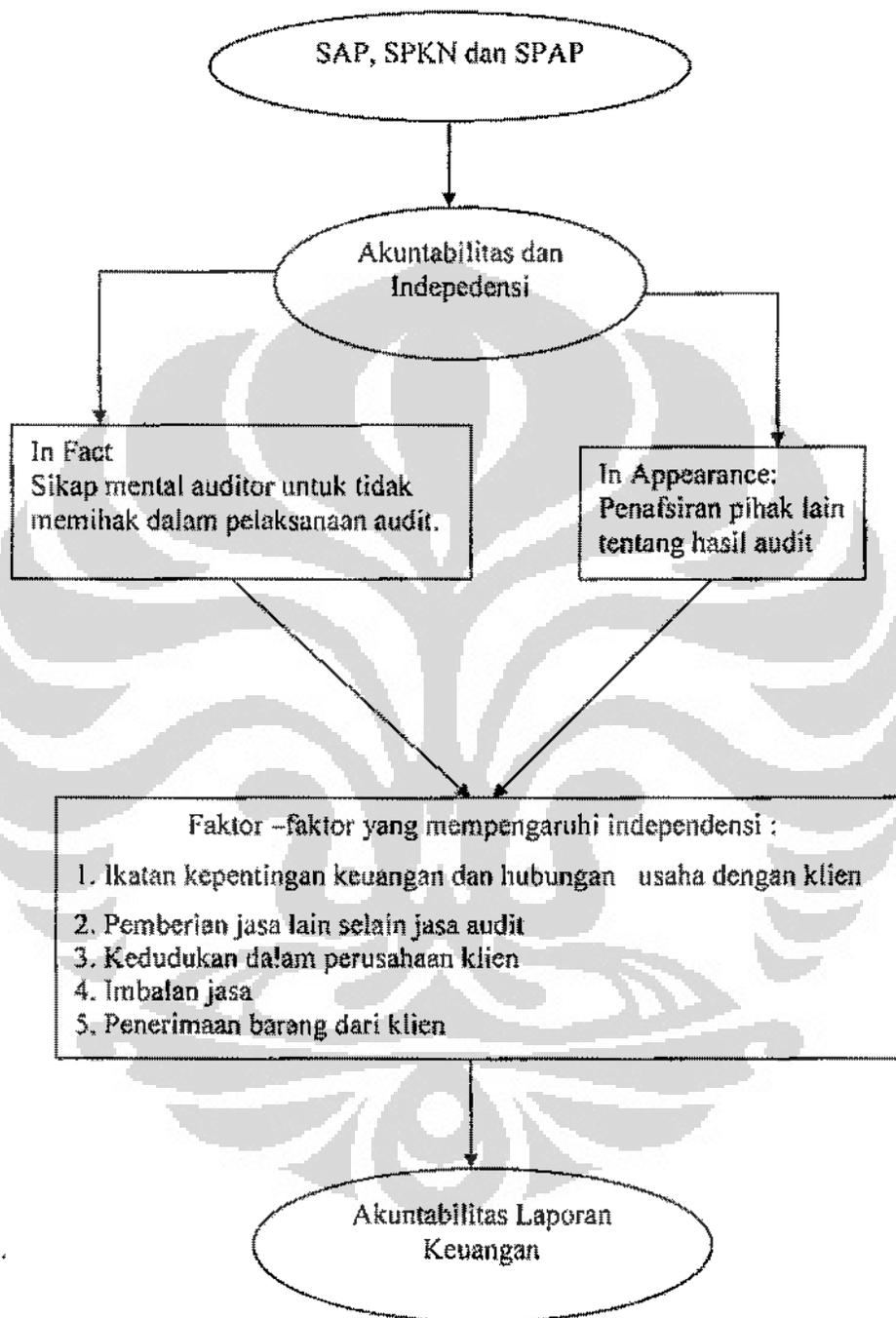
Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Alasan mengapa begitu banyak pihak yang sangat menggantungkan kepercayaan terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor adalah karena harapan mereka untuk mendapatkan pandangan yang tidak memihak (*independen*). Berbagai usaha dilakukan oleh auditor untuk menjaga dan mempertahankan sikap *independen* dalam pelaksanaan auditnya, dengan harapan akuntan publik bebas dari pengaruh – pengaruh yang mempengaruhi dirinya baik secara fakta, dan secara penampilan. Hal inilah yang membuat penulis mencoba melakukan studi untuk menguji *independensi* sebuah kantor akuntan publik dalam pelaksanaan audit.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Gambar 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran



Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

2.10. Perumusan Hipotesa

Sesuai dengan faktor – faktor utama yang berpengaruh terhadap Independensi akuntan pada Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Profrsional Akuntan Publiik, maka penefitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

H_{01} : Tidak terdapat perbedaan Standar Audit Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan .

H_{a1} : Terdapat perbedaan Standar Audit Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

H_{02} : Tidak terdapat perbedaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

H_{a2} : Terdapat perbedaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

H_{03} : Tidak terdapat perbedaan Standar Profrsional Akuntan Publik terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

H_{a3} : Terdapat perbedaan Standar Profrsional Akuntan Publik terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Unit Analisis

Unit analisis adalah suatu unit yang diamati dan akan di jelaskan serta merupakan satuan dari obyek studi untuk memudahkan dalam penulisan ini, unit analisis yang di gunakan oleh penulis adalah suatu kelompok atau organisasi, yaitu Auditor pada Kantor Pemerintah, Kantor Akuntan Publik.

Untuk itu maka dengan memusatkan pada auditor Kantor Pemerintah, Kantor Akuntan Publik, diharapkan analisis yang digunakan akan lebih efektif, efisien dan lebih mudah bagi penulis untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci apakah auditor telah menjelaskan independensinya dalam melaksanakan pekerjaannya pada Kantor Pemerintah, Kantor Akuntan Publik.

3.2. Rancangan Penelitian

Rancangan adalah suatu pengaturan dari syarat – syarat untuk mengontrol dari pengumpulan data di dalam penelitian dengan tujuan untuk mengkombinasikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk dapat memperoleh data yang lengkap serta hasil yang akurat maka penulis menggunakan rancangan penelitian dengan metode deskriptif. Alasan dilakkukannya hal ini adalah untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data – data dan sifat – sifat serta hubungan yang diselidiki yaitu adanya perbedaan Standar Audit Pemerintah,

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Profrsional Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

3.3. Variabel dan pengukuran

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian dan berupa suatu konsep yang mempunyai variasi nilai yang dapat diidentifikasi melalui kerangka pemikiran yang telah ditentukan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dalam BAB II, maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor – faktor yang dapat mempengaruhi independensi baik secara nyata (*in fact*) maupun secara penampilan (*in appearance*) pada Kantor Pemerintah, Kantor Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut :

1. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien
2. Jasa - jasa lain selain jasa audit
3. Posisi jasa lain selain jasa audit
4. Imbalan jasa (*audit fee*)
5. Penerimaan barang dari klien

Sedangkan Variabel terikat yaitu : Entitas Pemerintah.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi dari vaiabel bebas (*independen variabel*) dan variabel terikat (*dependen variabel*) dalam hubungannya dengan penelitian ini.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Variabel Bebas

Variabel Bebas dalam pemikiran ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi Independen akuntan publik yang terdiri dari :

1. Ikatan Kepentingan Keuangan dan hubungan usaha dengan Klein

Segala sesuatu yang menggambarkan adanya suatu keterkaitan bidang keuangan usaha antara akuntan publik dengan Kleinnya yang menggambarkan atau menunjukkan adanya suatu kepentingan.

2. Pemberian jasa lain selain jasa audit

Banyaknya jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik selain jasa audit terutama kepada klien yang sama.

3. Kedudukan dalam perusahaan Klein

Jika seorang auditor dalam penugasannya menjadi :

- a. Anggota dewan komisaris, direksi atau karyawan dalam perusahaan Klein,
- b. Rekan usaha atau karyawan salah satu anggota dewan komisaris, direksi atau karyawan perusahaan Klein.

4. Imbalan jasa

Merupakan besarnya pendapatan yang diterima oleh akuntan publik berdasarkan jasa – jasa audit yang diberikan dalam suatu periode tertentu

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

yang berasal dari Klein, dimana jasa profesional ini tidak boleh tergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut.

5. Penerimaan barang dari Klein

Klein memberikan hadiah kepada auditor karena beberapa alasan, ada yang bertujuan mempengaruhi auditor sehingga memudahkan keluarnya opini wajar tanpa pengecualian darinya dan ada pula yang menganggap sebagai hadiah biasa tanpa pamrih dan tidak menuntut apapun dari auditor.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui :

3.5.1. Kuesioner

Instrumen ini dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Berikut ini kisi – kisi kuesioner untuk variabel – variabel yang mendasari independensi akuntan publik dalam penentuan kewajaran laporan keuangan.

3.5.2. Wawancara

Dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada sebagian responden yang terkait dengan penelitian ini. Teknik ini dimaksudkan untuk mendukung kuesioner dan mendapatkan data serta informasi untuk penelitian.

3.5.3. Studi Kepustakaan

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai perusahaan dalam hal – hal lain yang diperlukan dalam penelitian melalui penelusuran studi pustaka.

3.6. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menganalisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Independensi akuntan publik. Metode yang digunakan agar tujuan penelitian dapat tercapai adalah metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh analisis atas masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan dari penelitian disusun dalam tabel agar dapat memperoleh dalam mengevaluasi dan menganalisisnya. Analisa ini kemudian diolah dan diuji dengan menggunakan metode statistik melalui uji proporsi dengan metode *chi-square* dan uji hipotesa.

Langkah – langkah yang diambil untuk menganalisa data adalah sebagai berikut :

1. Menggolongkan data yang diperoleh ke dalam tabel
2. Menentukan tingkat signifikansi, dalam penelitian ini digunakan $\alpha = 0,05$
3. Menghitung proporsi jawaban setiap pertanyaan dari kuesioner tentang faktor – faktor yang mempengaruhi independensi dengan cara :
4. Melakukan uji proporsi dan analisis *chi-square* dengan $n \geq 100$ untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan proporsi jawaban antar golongan responden.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

a. Menentukan kriteria pengujian hipotesis dalam hal ini :

H_0 diterima atau H_a ditolak jika :

$$X^2 < X^2 \{ \alpha ; (r - 1) (k - 1) \} :$$

H_0 diterima atau H_a ditolak jika :

$$X^2 > X^2 \{ \alpha ; (r - 1) (k - 1) \} :$$

b. Menguji hipotesa yaitu menghitung X^2 dan membandingkannya dengan

$X^2 < X^2 \{ \alpha ; (r - 1) (k - 1) \}$ dengan rumus :

$$e_{ij} = \frac{(n_{ij}) (n_{j.})}{n} \quad \text{Sehingga} \quad X^2 = \sum \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

c. Menarik kesimpulan :

- Jika H_0 diterima, maka tidak ada perbedaan proporsi jawaban antara ketiga golongan responden.
- Jika H_a tidak diterima, maka ada perbedaan proporsi jawaban antara ketiga golongan responden.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Objek Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan dan tugasnya diamanatkan oleh Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945. Amanat ini direalisasikan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Audit Pemerintah (SAP) ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan hasil referensi dari *yellow book* tahun 1994 (*Government Auditing Standar – GAO-USA*). SAP harus digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun jenis pemeriksaannya meliputi; (1) Audit Keuangan dengan menggunakan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2) Audit Kinerja. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu pelaksanaan Pemeriksaan dan persyaratan pelaporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAK) merupakan pedoman bagi akuntan dalam menjalankan profesinya sebagai tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Contoh Kantor Akuntan Publik ada yang berbentuk perusahaan perseorangan/persekutuan. Dalam suatu perusahaan yang

berbentuk perusahaan beberapa akuntan publik bergabung menjalankan usahanya bersama – sama sebagai sekutu / rekan. Mereka memberikan jasa audit dan jasa lainnya kepada pihak yang berminat. Biasanya para rekan memperkerjakan tenaga–tenaga profesional lainnya untuk membantu mereka. Para asisten ini biasanya memperoleh gelar akuntan, mahasiswa jurusan akuntansi tingkat akhir atau lulusan D3 akuntansi. Berdasarkan buku akuntan publik directory tahun 2005 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), bahwa sampai saat ini ada sekitar 635 buah Kantor Akuntan Publik di seluruh Indonesia. Untuk menunjang penelitian ini, penulis membagikan masing-masing 50 kuesioner kepada Departemen yang diaudit oleh BPK, Karyawan BPK dan Kantor Akuntan Publik. Pembagian keusioner ini dilakukan secara merata, dengan data ini, penulis berusaha menjabarkan dan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi signifikansi perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profrsional Akuntan Publik (SPAK) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

4.2. Faktor Independen

4.2.1. Independensi secara kenyataan (*Independence in Fact*)

Beberapa kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk mempertahankan dan melaksanakan sikap independen selama audit, yaitu:

- 1) Mewajibkan auditor dalam setiap palaksanaan tugasnya untuk bersikap jujur, objektif, dan tidak memihak. Apabila auditor tidak dapat memenuhi kriteria

tersebut diatas, ia diperkenankan untuk menolak penugasan. Jika auditor mengalami kesulitan untuk bersikap independen, sehubungan dengan kurangnya pengetahuan, auditor wajib bertanya kepada yang lebih senior.

- 2) Menggunakan jasa penilai independen (appraisal independen), apabila auditor mengalami kesulitan untuk menilai sesuatu / barang diluar keahlian profesinya.
- 3) Setiap auditor mematuhi semua standar profesinya, anda diwajibkan untuk mematuhi semua standar profesi, baik itu SPAP, Kode Etik Akuntan Indonesia, dan SAK yang telah ditetapkan oleh IAI
- 4) Mewajibkan setiap calon auditor, baik sifatnya permanen maupun temporary, mendatangi Kontrak Perjanjian Kerja dengan sejujur – jujurnya dan bertanggung jawab. Salah satu point yang tercantum didalamnya, adalah dituntut bersikap independen dalam penugasan audit.
- 5) Setiap auditor diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan mempertahankan independensi dengan sejujur – jujurnya satu tahun sekali mulai lever Junior sampai Managing Parther.
- 6) Setiap partner yang mempunyai ijin untuk mengaudit perusahaan go publik, telah membuat surat pernyataan kepada Bapepam bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan dan kepentingan apapun dengan perusahaan go publik yang diauditnya.

- 7) Membentuk suatu badan yang dinamakan Komite Audit, ini merupakan pihak independen, yang tidak terlibat dalam pelaksanaan audit. Apabila ada hal yang meragukan, dapat meminta pendapat Komite Audit.

4.2.2. Independendensi dalam Penampilan (*Independence in appearance*)

Setiap akuntan harus menghindari hal – hal yang mungkin meragukan ketiga atas independensinya dalam pelaksanaan audit.

- 1) Hubungan keuangan dan usaha dengan klien.

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, auditor mengaku tidak pernah mempunyai hubungan keuangan, seperti :

- Mempunyai saham atau investasi di perusahaan yang diauditnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Mempunyai bisnis bersama dengan kliennya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Mempunyai hutang piutang dengan kliennya baik yang bersifat wajar atau tidak wajar, langsung maupun tidak langsung.

Apabila akuntan mempunyai hubungan keuangan terhadap klien, auditor tersebut di tarik kembali dari perusahaan yang sedang diauditnya dan digantikan dengan auditor lainnya.

2). Hubungan keluarga dengan klien

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, auditor mengaku sampai saat ini mempunyai hubungan keluarga dengan perusahaan yang sedang diaudit. Salah satu partner pernah menolak penugasan audit oleh calon klien yang merupakan milik pamannya, dan mengalihkan penugasan ke partner yang lain dalam kantor akuntan yang sama. Selain itu auditor pernah mengundurkan diri atas audit klien tertentu karena menganggap dirinya mempunyai hubungan keluarga.

4.2.3. Jasa – jasa selain audit

Selain memberikan jasa audit, kantor akuntan ini juga memberikan jasa – jasa non audit. Setiap jasa non audit mempunyai divisi dan sfat tersendiri. Staf jasa non audit tidak merangkap sebagai auditor. Berdasarkan informasi yang diterima penulis, auditornya tidak pernah merangkap sebagai karyawan, direksi atau pemegang saham di perusahaan klien, karena hal tersebut dilarang.

4.2.4. Imbalan Jasa

Berdasarkan penjelasan yang diterima oleh penulis, KAP ini tidak pernah menentukan imbalan jasa berdasarkan hasil laporan audit. Apabila salah satu klien menunggak audit fee lewat dari 1 tahun, kantor akuntan ini menghentikan audit untuk tahun berikutnya. Menurut pengakuan salah satu partner, peristiwa tersebut pernah terjadi.

4.2.5. Penerimaan barang dari klien

Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis, auditor tidak diperbolehkan meminta atau menerima sesuatu dari klien. Namun kenyataannya ada beberapa auditor pernah menerima hadiah dari klien.

4.3. Profil Responden

Dalam melakukan penelitian ini telah dikumpulkan pendapat independen dari kuisioner yang telah dibagikan terhadap 18 pertanyaan yang berkaitan dan erat hubungannya dengan independensi akuntan publik dalam pelaksanaan audit. Responden diminta untuk menjawab "sangat setuju (SS)", "setuju (S)", "kurang setuju (KS)", "tidak setuju (TS)" terhadap setiap pertanyaan yang ada. Setiap pertanyaan akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa proporsi untuk mengetahui berapa persen banyaknya responden yang berpendapat "sangat setuju (SS)", "setuju (S)", "kurang setuju (KS)", "tidak setuju (TS)". Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden adalah para auditor yang dijadikan sample, dari salah satu kantor akuntan publik di Jakarta. Data yang diperoleh dari keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1
Perbandingan Populasi dengan Sample

Jumlah Populasi	Jumlah Sample	Persentasi Sample
564 orang	423 orang	75

Dibagian ini akan menguraikan beberapa gambaran diri responden (auditor) yang menjawab kuisisioner yang disebarakan oleh penulis. Adapun gambaran – gambaran tersebut di bawah ini :

4.3.1. Jenis kelamin Responden

Dilihat dari jenis kelamin sebgain besar responden adalah wanita () sedangkan responden pria sebanyak () dari jumlah kuisisioner yang dikembalikan kepada penulis.

TABEL 4.2
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
1.	Pria	345	81,56
2.	Wanita	78	18,44
	Total	423	100

4.3.2. Umur Responden

Ditinjau dari umur, sebgain besar berumur antara 31 sampai dengan 40 tahun (%)

TABEL 4.3
Jumlah Reponden Berdasarkan Umur Reponden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20 – 30 th	87	20,56
2	31 – 40 th	221	52,25
3.	41 – 50 th	115	27,19
	Total	423	100

4.3.3. Lama Bekerja

Ditinjau dari lamanya responden bekerja sebagian besar baru bekerja antara 6 sampai dengan 15 tahun.

TABEL 4.4
Jumlah Reponden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1.	1 th – 5 th	88	20,80
2	6 th – 10 th	247	58,39
3.	11 th – 15 th	88	20,81
	Total	423	100

4.3.4. Jenjang Pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, sebagian besar reponden berpendidikan S1 (%)

TABEL 4.5
Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D4	57	13,48
2	S1	304	71,87
3	S2	62	14,65
	Total	423	100

4.3.5. Jenjang Kedudukan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, sebagian besar responden memiliki jumlah persentase yang sama.

TABEL 4.6
Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Kedudukan

No	Kedudukan	Jumlah	Persentase
1	Senior Auditor	268	63,34
2	Supervisor	104	24,59
3	Manager	51	12,07
	Total	423	100

4.4. Analisis dan Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil analisis independensi yang didasarkan pada hasil jawaban responden. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan statistik Chi Square. Hasil analisis secara lengkap disajikan pada uraian berikut.

4.4.1. Analisis atas Usaha Bersikap Independen Dari Segi Fakta (*Independence in Fact*)

Sikap independensi dari segi fakta mencakup sampai sejauh akuntan membuat langkah – langkah yang konkret dalam usaha mewujudkan sikap independen setiap auditornya. Langkah – langkah tersebut merupakan hasil pengembangan pihak kantor akuntan mengenai independensi secara fakta pada setiap penugasan audit, sebagaimana

tercantum di pernyataan etika profesi IAI, tahun 2001, No. 1 dan SPAP. Sekurangnya ada sembilan aspek terkait dengan sikap independensi dari segi fakta, seperti diuraikan berikut.

4.4.1.1. Sikap kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak auditor

Salah sikap independensi dari segi fakta yang harus dimiliki oleh Auditor yaitu kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak terhadap klien. Jawaban responden untuk mengenatahui independen tidaknya Auditor terhadap aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Jawaban Responden Mengenai Sikap Kejujuran, Objektivitas, dan Tidak Memihak Auditor

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	119	118	123	84,4	83,7	87,2
2	Setuju	22	23	18	15,6	16,3	12,8
3	Kurang Setuju	-	-	-	-	-	-
4	Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.8
Chi-Square Tests
Kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak terhadap klien

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.783 ^a	2	.676
Likelihood Ratio	.798	2	.671
Linear-by-Linear Association	.447	1	.504
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.00.

Dari hasil jawaban tersebut terlihat sebagian besar responden 84,40% menyatakan sangat setuju dan sisanya 15,6% menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak kepada klien merupakan aspek yang menentukan independensi auditor. Dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 0,783 dengan signifikansi sebesar 0,676. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.1.2. Menggunakan jasa penilai independen jika mengalami kesulitan untuk menilai sesuatu / barang diluar keahlian profesinya

Aspek menggunakan jasa penilai independen jika mengalami kesulitan untuk menilai sesuatu/barang di luar keahlian profesinya, juga merupakan aspek independensi dari segi fakta. Hasil jawaban responden terkait dengan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.9

Jawaban Responden Mengenai Penggunaan Jasa Penilai Independen Jika Mengalami Kesulitan untuk Menilai Sesuatu/Barang Diluar Keahlian Profesinya

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	56	65	74	39,7	46,2	52,5
2	Setuju	71	66	60	50,4	46,8	42,5
3	Kurang Setuju	9	5	7	6,4	3,5	5
4	Tidak Setuju	5	5	0	3,5	3,5	
Jumlah		141	141	141	100	100	100

67

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Tabel 4.10

Chi-Square Tests
Menggunakan jasa penilai independen jika mengalami kesulitan untuk menilai
sesuatu / barang diluar keahlian profesinya

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.559 ^a	6	.144
Likelihood Ratio	12.696	6	.048
Linear-by-Linear Association	6.736	1	.009
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33.

Jawaban pada tabel 4.11 dominan pada alternatif jawaban setuju, yaitu 46,2%, sangat setuju 46,8, kurang setuju 3,5% dan tidak setuju 3,5%. Hal ini mencerminkan bahwa Auditor menilai sangat perlu menggunakan jasa penilai independen jika mengalami kesulitan untuk menilai sesuatu/barang diluar keahlian profesinya untuk menjaga independensi. Dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 9.559 dengan signifikansi sebesar 0,144. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.1.3. Mematuhi semua standar profesi yang telah ditetapkan oleh IAI

Mematuhi semua standar profesi, baik itu SPAP, Kode Etik Akuntan Indonesia, dan SAK yang telah ditetapkan oleh IAI merupakan salah satu aspek independensi dari

segi fakta. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan terhadap Semua Standar Profesi

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	99	102	130	70,2	72,3	92,2
2	Setuju	41	39	10	29,1	27,7	7,1
3	Kurang Setuju	0	0	0	0	0	0
4	Tidak Setuju	1	0	1	0,7	0	0,7
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.12
Chi-Square Tests
Kepatuhan terhadap Semua Standar Profesi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.366 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	30.895	4	.000
Linear-by-Linear Association	16.681	1	.000
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67.

Kepatuhan Auditor terhadap semua standar profesi yang telah ditetapkan oleh IAI dapat dikatakan sangat baik. Hal ini terlihat dari mayoritas responden 70,2% yang menjawab sangat setuju yang diikuti jawaban setuju sebanyak 29,1% dan tidak setuju 0,7%. Kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 26,366 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

69

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.1.4. Setiap calon auditor diwajibkan menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja yang didalamnya dituntut untuk bersikap independen dalam penugasan audit dan dapat dipertanggungjawabkan

Menandatangani kontrak perjanjian kerja untuk bersikap independen dalam penugasan audit merupakan salah satu aspek independensi dari segi fakta. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.113
Jawaban Responden Mengenai Menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja dalam penugasan audit.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	62	69	67	44	48,9	47,5
2	Setuju	51	50	62	36,2	35,5	44
3	Kurang Setuju	16	16	7	11,3	11,3	5
4	Tidak Setuju	12	6	5	8,5	4,3	3,5
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.14
Chi-Square Tests
Menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja dalam penugasan audit

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.919 ^a	6	.128
Likelihood Ratio	10.154	6	.118
Linear-by-Linear Association	3.926	1	.048
N of Valid Cases	423		

^a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.67.

Kepatuhan Auditor dalam penandatanganan konytrak kerja dalam penugasan audit dapat dikatakan sangat baik. Hal ini terlihat dari mayoritas responden 44% yang

menjawab sangat setuju yang diikuti jawaban setuju sebanyak 36,2%, menjawab kurang setuju 11,3% dan 8,5% menjawab tidak setuju. Kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 9.919 dengan signifikansi sebesar 0,128. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.1.5. Setiap auditornya membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mempertahankan independensi dengan sejujur-jujurnya, minimal 1 tahun sekali mulai dari level junior sampai managing partner

Membuat surat pernyataan kesanggupan dalam mempertahankan independensinya dengan sejujur-jujurnya merupakan salah satu aspek independensi dari segi fakta. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Jawaban Responden Mengenai Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mempertahankan independensi dengan sejujur-jujurnya.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	41	52	56	29,1	36,9	39,7
2	Setuju	62	59	43	44	41,8	30,5
3	Kurang Setuju	23	20	36	16,3	14,2	25,5
4	Tidak Setuju	15	10	6	10,6	7,1	4,3
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.16
Chi-Square Tests
Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mempertahankan independensi dengan sejujur-jujurnya

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.676 ^a	6	.016
Likelihood Ratio	15.742	6	.015
Linear-by-Linear Association	1.701	1	.192
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.33.

Kesanggupan membuat surat pernyataan kesanggupan dalam mempertahankan independensinya dalam melaksanakan audit dapat dikatakan sangat baik. Hal ini terlihat dari responden 29,1% menjawab sangat setuju, setuju 44%, kurang setuju sebanyak 16,3% dan tidak setuju 10,6%. Kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 15,676 dengan signifikansi sebesar 0,016. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.1.6. Kepemilikan izin untuk mengaudit perusahaan go publik, dan telah membuat surat pernyataan ke Bapepam, bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan dan kepentingan apapun dengan perusahaan go publik yang diauditnya

Kepemilikan izin untuk mengaudit perusahaan go publik, dan membuat surat pernyataan ke Bapepam, bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan dan kepentingan apapun dengan perusahaan go publik yang diauditnya merupakan salah satu aspek

72

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

independensi dari segi fakta. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Jawaban Responden Mengenai Kepemilikan izin untuk mengaudit perusahaan go publik,

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	53	54	60	37,6	38,3	42,6
2	Setuju	70	70	56	49,6	49,6	39,7
3	Kurang Setuju	13	14	25	9,2	9,9	17,7
4	Tidak Setuju	5	3	0	3,5	2,1	0
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.18
Chi-Square Tests
Jawaban Responden Mengenai Kepemilikan izin untuk mengaudit perusahaan go publik

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.380 ^a	6	.054
Likelihood Ratio	14.407	6	.025
Linear-by-Linear Association	.164	1	.685
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.67.

Kepatuhan Auditor dalam kepemilikan izin untuk mengaudit perusahaan go public bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan dan kepentingan dengan perusahaan yang diauditnya dikatakan baik. Hal ini terlihat dari mayoritas responden 37,6% yang menjawab sangat setuju yang diikuti jawaban setuju sebanyak 49,6%, 9,2% menjawab kurang setuju dan 3,5% menjawab tidak setuju. Kemudian dari hasil perhitungan

73

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 12,380 dengan signifikansi sebesar 0,054. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.1.7. Menanyakan hal yang meragukan kepada badan Komite Audit yang sudah terbentuk di KAP tempat anda bekerja untuk dimintai pendapatnya

Menanyakan hal yang meragukan ke Badan Komite Audit merupakan salah satu aspek independensi dari segi fakta. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Jawaban Responden Mengenai Menanyakan hal yang meragukan ke Badan Komite Audit

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	47	51	64	33,3	36,2	45,4
2	Setuju	88	83	49	62,4	58,9	34,8
3	Kurang Setuju	5	5	27	3,5	3,5	19,1
4	Tidak Setuju	1	2	1	0,7	1,4	0,7
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.20
Chi-Square Tests
Menanyakan hal yang meragukan ke Badan Komite Audit

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	41.870 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	40.721	6	.000
Linear-by-Linear Association	.205	1	.651
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.33.

Kepatuhan Auditor dalam menanyakan ke Badan Komite Audit yang sudah terbentuk di KAP untuk dimintai pendapatnya dikatakan baik. Hal ini terlihat dari responden 33,3% yang menjawab sangat setuju yang diikuti jawaban setuju sebanyak 62,4%, jawaban kurang setuju 3,5% dan jawaban tidak setuju 0,7%, kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 41,870 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan

4.4.2. independen dari segi penampilan (*independence in appearance*)

4.4.2.1. Ikatan Kepentingan Keuangan dan hubungan usaha dengan klien

4.4.2.1.1. Menurut anda, apabila auditor mempunyai saham di salah satu perusahaan yang diauditnya, akan mengurangi independensinya sebagai auditor?

75

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Auditor mempunyai saham di salah satu perusahaan yang diauditnya, akan mengurangi independensi sebagai auditor merupakan salah satu aspek independensi dari segi penampilan. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21
Jawaban Responden Mengenai apabila auditor mempunyai saham di salah satu perusahaan yang diauditnya.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	46	39	45	32,6	27,7	31,9
2	Setuju	65	66	77	46,1	46,8	54,6
3	Kurang Setuju	25	31	17	17,7	22	12,1
4	Tidak Setuju	5	5	2	3,5	3,5	1,4
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.22
Chi-Square Tests
Auditor mempunyai saham di salah satu perusahaan yang diauditnya
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.495 ^a	6	.277
Likelihood Ratio	7.791	6	.254
Linear-by-Linear Association	1.018	1	.313
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.

Auditor mempunyai saham di salah satu perusahaan yang diauditnya, dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari responden 32,6% menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 46,1%, jawaban kurang setuju 17,7% dan jawaban tidak setuju 3,5%,

76

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 7,495 dengan signifikansi sebesar 0,227. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan

4.4.2.1.2. Menurut anda, apabila anda mempunyai hubungan keluarga dengan perusahaan yang sedang anda audit, setujukah anda apabila KAP tempat anda bekerja menarik anda dari penugasannya

Auditor mempunyai hubungan keluarga dengan perusahaan yang diauditnya, merupakan salah satu aspek independensi dari segi penampilan. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23
Jawaban Responden Mengenai apabila auditor mempunyai hubungan keluarga dengan perusahaan yang sedang di audit.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	45	39	49	31,9	27,7	34,8
2	Setuju	68	73	64	48,2	51,8	45,7
3	Kurang Setuju	23	20	25	16,3	14,2	17,7
4	Tidak Setuju	5	9	3	3,5	6,4	2,1
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.24
Chi-Square Tests
Jawaban Responden Mengenai apabila auditor mempunyai hubungan keluarga dengan perusahaan yang sedang di audit

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.591 ^a	6	.471
Likelihood Ratio	5.572	6	.473
Linear-by-Linear Association	.202	1	.653
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.67.

Auditor mempunyai hubungan keluarga di perusahaan yang diauditnya, dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari responden 31,9% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 48,20%, jawaban kurang setuju 16,3% dan jawaban tidak setuju 3,5%, kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 5,591 dengan signifikansi sebesar 0,471. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan

4.4.2.2.. Jasa – jasa selain audit

4.4.2.2.1. Suatu kantor akuntan selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa – jasanya kepada klien yang sama. Apakah menurut anda, akan mempengaruhi independensi akuntan publik apabila memberikan jasa – jasa lain tersebut.

Akuntan selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasanya kepada kiiernya, merupakan salah satu aspek independensi dari segi jasa-jasa selain audit. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25

Jawaban Responden Mengenai apabila kantor akuntan selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasanya kepada klien yang sama.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		S A P	SPKN	SPAK	S A P	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	16	18	16	11,3	12,8	11,3
2	Setuju	43	41	50	30,5	29,1	35,5
3	Kurang Setuju	62	70	65	44	49,6	46,1
4	Tidak Setuju	20	12	10	14,2	8,5	7,1
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.26

Chi-Square Tests

Jawaban Responden Mengenai apabila kantor akuntan selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasanya kepada klien yang sama

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.657 ^a	6	.463
Likelihood Ratio	5.477	6	.484
Linear-by-Linear Association	1.497	1	.221
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00.

Kantor akuntan selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasanya kepada klien yang sama di perusahaan yang diauditnya, dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari responden 11,5% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 30,5% kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 5,657 dengan signifikansi sebesar 0,463. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.2.2.2. Pemberian jasa selain audit dapat meningkatkan manfaat informasi yang di sajikan di dalam laporan pemeriksaan akuntan publik. Misalnya pemberian jasa sistem akuntansi dan jasa konsultasi perpajakan.

Pemberian jasa selain audit dapat meningkatkan manfaat informasi yang di sajikan di dalam laporan pemeriksaan akuntan publik, merupakan salah satu aspek independensi dari segi jasa-jasa selain audit. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27

Jawaban Responden Mengenai Pemberian jasa selain audit dapat meningkatkan manfaat informasi yang di sajikan di dalam laporan pemeriksaan akuntan publik

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	29	34	33	20,6	24,1	23,4
2	Setuju	90	99	88	63,8	70,2	62,4
3	Kurang Setuju	10	7	11	7,1	5	7,8
4	Tidak Setuju	12	1	9	8,5	0,7	6,4
Jumlah		141	141	141	100	100	100

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

Tabel 4.28
Chi-Square Tests
Mengenai Pemberian jasa selain audit dapat meningkatkan manfaat informasi yang di sajikan di dalam laporan pemeriksaan akuntan publik

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.928 ^a	6	.091
Likelihood Ratio	13.668	6	.034
Linear-by-Linear Association	.575	1	.448
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.33.

Pemberian jasa selain audit dapat meningkatkan manfaat informasi yang disajikan di dalam laporan pemeriksaan, dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari responden 20,6% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 63,8% kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 10,928 dengan signifikansi sebesar 0,091. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan

4.4.2.2.3. Memberikan jasa audit, tempat anda bekerja memberikan jasa non audit, apakah anda salah satu dari staf atau divisi dari jasa non audit tersebut?

Pemberian jasa selain non audit, merupakan salah satu aspek independensi dari segi jasa-jasa selain audit. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Jawaban Responden Mengenai Pemberian jasa non audit

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	6	11	7	4,3	7,8	5
2	Setuju	33	23	21	23,4	16,3	14,9
3	Kurang Setuju	58	78	79	41,1	55,3	56
4	Tidak Setuju	4	29	34	31,2	20,6	24,1
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.30
Chi-Square Tests
Jawaban Responden Mengenai Pemberian jasa non audit

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.158 ^a	6	.059
Likelihood Ratio	12.078	6	.060
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000
N of Valid Cases	423		

^a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00.

Pemberian jasa selain audit dapat dikatakan tidak baik. Hal ini terlihat dari responden 4,3% menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 23,4%, jawaban kurang setuju 41,1% dan tidak setuju 31,20%, kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 12,158 dengan signifikansi sebesar 0,059. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan

82

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

4.4.2.3. Imbalan Jasa

4.4.2.3.1. KAP tempat anda bekerja akan menghentikan pelaksanaan audit untuk tahun berikutnya, apabila salah satu kliennya ada yang menunggak audit fee selama lebih dari 1 tahun. Setujukah anda akan pernyataan tersebut ?

Penghentian pelaksanaan audit apabila klien menunggak audit fee selama lebih dari 1 tahun merupakan salah satu aspek independensi dari segi imbalan jasa. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.31
Jawaban Responden Mengenai Penghentian pelaksanaan audit apabila klien menunggak audit fee selama lebih dari 1 tahun.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	21	25	26	14,9	17,7	18,4
2	Setuju	36	55	50	25,5	39	35,5
3	Kurang Setuju	51	47	51	36,2	33,3	36,2
4	Tidak Setuju	33	14	14	23,4	9,9	9,9
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.32
Chi-Square Tests
Penghentian pelaksanaan audit apabila klien menunggak audit fee selama lebih dari 1 tahun.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.762 ^a	6	.010
Likelihood Ratio	16.153	6	.013
Linear-by-Linear Association	7.450	1	.006
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.33.

Penghentian pelaksanaan audit apabila klien menunggak audit fee lebih dari 1 tahun dapat dikatakan tidak baik. Hal ini terlihat dari responden 14,9% yang menjawab sangat setuju yang diikuti jawaban setuju sebanyak 25,5%, kurang setuju 36,2% dan tidak setuju 23,4%, kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 16,762 dengan signifikansi sebesar 0,010. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.2.3.2. Besarnya audit fee yang diterima oleh kantor akuntan publik merupakan total pendapatan dari kantor tersebut. Setujukah anda dengan pernyataan tersebut ?

Audit fee yang diterima oleh kantor akuntan merupakan total pendapatan, hal ini merupakan salah satu aspek independensi dari segi imbalan jasa. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.33
Jawaban Responden Mengenai besarnya audit fee yang diterima merupakan total pendapatan .

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	10	9	15	7,1	6,4	10,6
2	Setuju	39	31	29	27,7	22	20,6
3	Kurang Setuju	61	70	69	43,3	49,6	48,9
4	Tidak Setuju	11	31	28	22	22	19,9
Jumlah		141	141	141	100	100	100

Tabel 4.34
Chi-Square Tests
Mengenai besarnya audit fee yang diterima merupakan total pendapatan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.450 ^a	6	.616
Likelihood Ratio	4.359	6	.628
Linear-by-Linear Association	.043	1	.835
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.33.

Besarnya audit fee yang diterima merupakan total pendapatan dapat dikatakan tidak baik. Hal ini terlihat dari responden 7,1% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 27,7%, jawaban kurang setuju 43,3% dan jawaban tidak setuju 22%. Hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 4,450 dengan signifikansi sebesar 0,616. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.3.2.3.3. Apakah menurut anda audit fee tergantung dari besar/kecilnya ruang lingkup pekerjaan ?

Audit fee tergantung dari besar/kecilnya ruang lingkup pekerjaan merupakan salah satu aspek independensi dari segi imbalan jasa. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.35
Jawaban Responden Mengenai Audit fee tergantung dari besar/kecilnya ruang lingkup pekerjaan

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	50	38	35	35,3	27	24,8
2	Setuju	46	60	60	32,6	42,6	42,6
3	Kurang Setuju	29	21	27	20,6	14,9	19,1
4	Tidak Setuju	16	22	19	11,3	15,6	13,5
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.36
Chi-Square Tests
Mengenai Audit fee tergantung dari besar/kecilnya ruang lingkup pekerjaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.733 ^a	6	.258
Likelihood Ratio	7.771	6	.255
Linear-by-Linear Association	1.295	1	.255
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00.

Audit fee tergantung dari besar/kecilnya pekerjaan dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari responden 35,3% menjawab sangat setuju, jawaban setuju 32,6%, jawaban kurang setuju sebanyak 20,6% dan tidak setuju 11,3%, kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 7,733 dengan signifikansi sebesar 0,258. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah,

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.3.2.3.4. Apakah anda akan memberikan opini sesuai dengan keinginan klien?

Pemberian opini sesuai dengan keinginan klien merupakan salah satu aspek independensi dari segi imbalan jasa. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.38.

Jawaban Responden Mengenai Pemberia opini sesuai dengan keinginan klien

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	2	2	1	1,4	1,4	0,7
2	Setuju	18	35	41	12,8	24,8	29,1
3	Kurang Setuju	30	33	40	21,3	23,4	28,4
4	Tidak Setuju	91	71	59	64,5	50,4	41,8
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.39.

Chi-Square Tests

Jawaban Responden Mengenai Pemberia opini sesuai dengan keinginan klien

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.114 ^a	6	.006
Likelihood Ratio	18.814	6	.004
Linear-by-Linear Association	13.890	1	.000
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67.

Pemberian opini sesuai dengan keinginan klien dapat dikatakan sangat tidak baik. Hal ini terlihat dari responden 1,4% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju

sebanyak 12,8%, jawaban kurang setuju 21,3% dan jawaban tidak setuju 64,5%. Hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 18,114 dengan signifikansi sebesar 0,006. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.2.4. Penerimaan barang dari klien

4.4.2.4.1. Apakah anda diperbolehkan meminta atau menerima sesuatu dari klien setelah penugasan berakhir?

Meminta atau menerima sesuatu dari klien setelah penugasan berakhir merupakan salah satu aspek independensi dari segi penerimaan barang dari klien. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.39
Jawaban Responden Mengenai meminta atau menerima barang dari klien setelah penugasan berakhir.

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	1	4	0	0,7	2,8	0
2	Setuju	27	34	23	19,1	24,1	16,3
3	Kurang Setuju	51	59	54	36,2	41,8	38,3
4	Tidak Setuju	62	44	64	44	31,2	45,4
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.40
Chi-Square Tests
Mengenai meminta atau menerima barang dari klien setelah penugasan berakhir

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.294 ^a	6	.056
Likelihood Ratio	13.234	6	.039
Linear-by-Linear Association	.368	1	.544
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67.

Meminta atau menerima sesuatu dari klien setelah penugasan berakhir dapat dikatakan tidak baik, hal ini terlihat dari responden 0,7% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 19,1%, jawaban kurang setuju 36,2% dan jawaban tidak setuju 44%. Hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 12,294 dengan signifikansi sebesar 0,056. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

4.4.2.4.2. Apabila penugasan telah berakhir, klien anda memberikan hadiah kepada anda, menurut anda apakah hal ini diperbolehkan

Pemberian hadiah setelah penugasan berakhir merupakan sah satu aspek independensi dari segi penerimaan barang dari klien. Hasil jawaban responden berkenaan dengan aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.41
Jawaban Responden Mengenai Pemberian hadiah setelah penugasan berakhir

No	Jawaban	Jumlah			%		
		SAP	SPKN	SPAK	SAP	SPKN	SPAK
1	Sangat Setuju	1	8	1	0,7	5,7	0,7
2	Setuju	26	58	45	18,4	41,1	31,9
3	Kurang Setuju	43	25	33	30,5	17,7	23,4
4	Tidak Setuju	71	50	62	50,4	35,5	44
	Jumlah	141	141	141	100	100	100

Tabel 4.42
Chi-Square Tests
Mengenai Pemberian hadiah setelah penugasan berakhir

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.318 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	30.364	6	.000
Linear-by-Linear Association	3.359	1	.067
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33.

Pemberian hadiah setelah penugasan berakhir dapat dikatakan tidak baik. Hal ini terlihat dari responden 0,7% yang menjawab sangat setuju, jawaban setuju sebanyak 18,4%, kemudian dari hasil perhitungan statistik diperoleh χ^2 hitung sebesar 30,318 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan statistik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikansi antara Standar Audit Pemerintah, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

90

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan dalam bab IV , peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Aspek Independensi menurut kenyataan (*Independence in Fact*) terhadap signifikansi perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAK) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, tidak terdapat perbedaan.
- 5.1.2. Aspek Independensi dalam Penampilan (*Independence in appearance*) terhadap signifikansi perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAK) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, tidak terdapat perbedaan.
- 5.1.3. Aspek Jasa – jasa selain audit terhadap signifikansi perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAK) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, tidak terdapat perbedaan.
- 5.1.4. Aspek Imbalan Jasa selain audit terhadap signifikansi perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan

Standar Profrsional Akuntan Publik (SPAK) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, tidak terdapat perbedaan.

5.1.5. Aspek Penerimaan Barang dari Klien terhadap signifikansi perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profrsional Akuntan Publik (SPAK) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, tidak terdapat perbedaan.

5.2. Saran

5.2.1. Profesi akuntan public di Indonesia sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dan hibungan baik dengan berbagai pihak, seperti reglator pemerintah, organisasi profesi dan masyarakat pengguna jasa.

5.2.2. Regulator pemerintah maupun profesi sebaiknya selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan atas peraturan-peraturan independensi.

5.2.3. Perkembangan peraturan independensi akuntan sebaiknya selalu mempertimbangkan relevansi dan *applicability*.

Analisis Signifikansi Perbedaan Standar Audit Pemerintah (SAP), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Independensi Pelaporan Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

ARENS, Alvin A dan James K Loebbecke, (1996) Auditing An Integrated Approach 9th Prentice Hall, USA

_____, (2003) Auding An Intregated Approach 9th Prentice Hall, USA

Glazer, A S and Jainecke, (2002) A Pathology of The Independence Standards Board's Conceptual Framework Project Accounting Horizons. USA

Gurajati, Damodar, (1995), Basic Econometrics, Third Edition, Mc Graw-Hill Inc, International Edition

_____, (1995), Essential Of Econometrics, Second Edition, McGraw-Hill Inc, International Edition

Harahap, Sofyan Syafri (2003), Analisis Praktis Atas Laporan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, (1994) Auditing, Rajawali Pers, Jakarta

IFAC Ethics Committee, (2004), Code of Ethics for Professional Accountant

Jusuf, Amir Abadi, (1996), Auditing, Salemba Empat, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, (2001) STandar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Salemba Empat, Jakarta

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) No. Kep-20/PM/2002

Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 yang terakhir diubah menjadi KMK No.359/KMK.06/2003

Kinney, William R. (1999), Auditor Independence A Burdensome Constraint or Core Value, Accounting Horizons, USA

Konrath, Larry F. (2003), Auditing A Risk Analysis Approach, 5th, South Western, Cincinnati

Kuncoro Mudrajat, (2001) , Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi), UPP AMP YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta

Mulyadi, (1998), Auditing, STIE YKPN, Yogyakarta

Mulyadi dan Puradiredja, Kanaka, (1998), Auditing, Salemba Empat, Jakarta

Santoso, Singgih, (2004), Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS versi 11,5, Penerbit Gramedia

Sugiyono, (2004), Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam, Penerbit Alfabeta, Bandung

Tunggal, Amin Wijaya, (2002), Internal Auditing, Harvarindo, Jakarta



LAMPIRAN

Pertanyaan 1

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan			Total
		Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	22	119	141
		% within X	15.6%	84.4%	100.0%
		% of Total	5.2%	28.1%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	23	118	141	
	% within X	16.3%	83.7%	100.0%	
	% of Total	5.4%	27.9%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	18	123	141	
	% within X	12.8%	87.2%	100.0%	
	% of Total	4.3%	29.1%	33.3%	
Total	Count	63	360	423	
	% within X	14.9%	85.1%	100.0%	
	% of Total	14.9%	85.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.783 ^a	2	.676
Likelihood Ratio	.796	2	.671
Linear-by-Linear Association	.447	1	.504
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.00.

Pertanyaan 2

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	5	9	71	56	141
		% within X	3.5%	6.4%	50.4%	39.7%	100.0%
		% of Total	1.2%	2.1%	16.8%	13.2%	33.3%
	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	5	5	66	65	141
		% within X	3.5%	3.5%	46.8%	46.1%	100.0%
		% of Total	1.2%	1.2%	15.6%	15.4%	33.3%
	Standard Profesional Akuntan Publik	Count	0	7	60	74	141
		% within X	.0%	5.0%	42.6%	52.5%	100.0%
		% of Total	.0%	1.7%	14.2%	17.5%	33.3%
Total	Count	10	21	197	195	423	
	% within X	2.4%	5.0%	46.6%	46.1%	100.0%	
	% of Total	2.4%	5.0%	46.6%	46.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.559 ^a	6	.144
Likelihood Ratio	12.696	6	.048
Linear-by-Linear Association	6.736	1	.009
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33.

Pertanyaan 3

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

			Akuntabilitas Pelaporan Keuangan			Total
			Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
X	Standar Audit Pemerintah	Count	1	41	99	141
		% within X	.7%	29.1%	70.2%	100.0%
		% of Total	.2%	9.7%	23.4%	33.3%
	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	0	39	102	141
		% within X	.0%	27.7%	72.3%	100.0%
		% of Total	.0%	9.2%	24.1%	33.3%
	Standard Profesional Akuntan Publik	Count	1	10	130	141
		% within X	.7%	7.1%	92.2%	100.0%
		% of Total	.2%	2.4%	30.7%	33.3%
Total		Count	2	90	331	423
		% within X	.5%	21.3%	78.3%	100.0%
		% of Total	.5%	21.3%	78.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	26.366 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	30.895	4	.000
Linear-by-Linear Association	16.681	1	.000
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67.

Pertanyaan 4

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	12	16	51	62	141
	% within X	8.5%	11.3%	36.2%	44.0%	100.0%	
	% of Total	2.8%	3.8%	12.1%	14.7%	33.3%	
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	6	16	50	69	141	
	% within X	4.3%	11.3%	35.5%	48.9%	100.0%	
	% of Total	1.4%	3.8%	11.8%	16.3%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	5	7	62	67	141	
	% within X	3.5%	5.0%	44.0%	47.5%	100.0%	
	% of Total	1.2%	1.7%	14.7%	15.8%	33.3%	
Total	Count	23	39	163	198	423	
	% within X	5.4%	9.2%	38.5%	46.8%	100.0%	
	% of Total	5.4%	9.2%	38.5%	46.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.919 ^a	6	.128
Likelihood Ratio	10.154	6	.118
Linear-by-Linear Association	3.926	1	.048
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.67.

Pertanyaan 5

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	15	23	62	41	141
	% within X		10.6%	16.3%	44.0%	29.1%	100.0%
	% of Total		3.5%	5.4%	14.7%	9.7%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	10	20	59	52	141	
	% within X		7.1%	14.2%	41.8%	36.9%	100.0%
	% of Total		2.4%	4.7%	13.9%	12.3%	33.3%
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	6	36	43	56	141	
	% within X		4.3%	25.5%	30.5%	39.7%	100.0%
	% of Total		1.4%	8.5%	10.2%	13.2%	33.3%
Total		Count	31	79	164	149	423
		% within X	7.3%	18.7%	38.8%	35.2%	100.0%
		% of Total	7.3%	18.7%	38.8%	35.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.676 ^a	6	.016
Likelihood Ratio	15.742	6	.015
Linear-by-Linear Association	1.701	1	.192
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.33.

Pertanyaan 6

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N.	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

X			Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total
			Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
Standar Audit Pemerintah	Count	5	13	70	53	141	
	% within X	3.5%	9.2%	49.6%	37.6%	100.0%	
	% of Total	1.2%	3.1%	16.5%	12.5%	33.3%	
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	3	14	70	54	141	
	% within X	2.1%	9.9%	49.6%	38.3%	100.0%	
	% of Total	.7%	3.3%	16.5%	12.8%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	0	25	56	60	141	
	% within X	.0%	17.7%	39.7%	42.6%	100.0%	
	% of Total	.0%	5.9%	13.2%	14.2%	33.3%	
Total	Count	8	52	196	167	423	
	% within X	1.9%	12.3%	46.3%	39.5%	100.0%	
	% of Total	1.9%	12.3%	46.3%	39.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.380 ^a	6	.054
Likelihood Ratio	14.407	6	.025
Linear-by-Linear Association	.184	1	.685
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.67.

Pertanyaan 7

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	1	5	88	47	141
		% within X	.7%	3.5%	62.4%	33.3%	100.0%
		% of Total	.2%	1.2%	20.8%	11.1%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	2	5	83	51	141	
	% within X	1.4%	3.5%	58.9%	36.2%	100.0%	
	% of Total	.5%	1.2%	19.6%	12.1%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	1	27	49	64	141	
	% within X	.7%	19.1%	34.8%	45.4%	100.0%	
	% of Total	.2%	6.4%	11.6%	15.1%	33.3%	
Total	Count	4	37	220	162	423	
	% within X	.9%	8.7%	52.0%	38.3%	100.0%	
	% of Total	.9%	8.7%	52.0%	38.3%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	41.870 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	40.721	6	.000
Linear-by-Linear Association	.205	1	.651
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.33.

Pertanyaan 8

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	5	25	65	46	141
		% within X	3.5%	17.7%	46.1%	32.6%	100.0%
		% of Total	1.2%	5.9%	15.4%	10.9%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	5	31	66	39	141	
	% within X	3.5%	22.0%	46.8%	27.7%	100.0%	
	% of Total	1.2%	7.3%	15.6%	9.2%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	2	17	77	45	141	
	% within X	1.4%	12.1%	54.6%	31.9%	100.0%	
	% of Total	.5%	4.0%	18.2%	10.6%	33.3%	
Total	Count	12	73	208	130	423	
	% within X	2.8%	17.3%	49.2%	30.7%	100.0%	
	% of Total	2.8%	17.3%	49.2%	30.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.495 ^a	6	.277
Likelihood Ratio	7.791	6	.254
Linear-by-Linear Association	1.018	1	.313
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.

Pertanyaan 9

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	5	23	68	45	141
		% within X	3.5%	16.3%	48.2%	31.9%	100.0%
		% of Total	1.2%	5.4%	16.1%	10.6%	33.3%
	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	9	20	73	39	141
		% within X	6.4%	14.2%	51.8%	27.7%	100.0%
		% of Total	2.1%	4.7%	17.3%	9.2%	33.3%
	Standard Profesional Akuntan Publik	Count	3	25	64	49	141
		% within X	2.1%	17.7%	45.4%	34.8%	100.0%
		% of Total	.7%	5.9%	15.1%	11.6%	33.3%
Total	Count	17	68	205	133	423	
	% within X	4.0%	16.1%	48.5%	31.4%	100.0%	
	% of Total	4.0%	16.1%	48.5%	31.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.591 ^a	6	.471
Likelihood Ratio	5.572	6	.473
Linear-by-Linear Association	.202	1	.653
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.67.

Pertanyaan 10

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

			Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total
			Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
X	Standar Audit Pemerintah	Count	20	62	43	16	141
		% within X	14.2%	44.0%	30.5%	11.3%	100.0%
		% of Total	4.7%	14.7%	10.2%	3.8%	33.3%
	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	12	70	41	18	141
		% within X	8.5%	49.6%	29.1%	12.8%	100.0%
		% of Total	2.8%	16.5%	9.7%	4.3%	33.3%
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	10	65	50	16	141	
	% within X	7.1%	46.1%	35.5%	11.3%	100.0%	
	% of Total	2.4%	15.4%	11.8%	3.8%	33.3%	
Total	Count	42	197	134	50	423	
	% within X	9.9%	46.6%	31.7%	11.8%	100.0%	
	% of Total	9.9%	46.6%	31.7%	11.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.657 ^a	6	.463
Likelihood Ratio	5.477	6	.484
Linear-by-Linear Association	1.497	1	.221
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00.

Pertanyaan 11

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	12	10	90	29	141
		% within X	8.5%	7.1%	63.8%	20.6%	100.0%
		% of Total	2.8%	2.4%	21.3%	6.9%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	1	7	99	34	141	
	% within X	.7%	5.0%	70.2%	24.1%	100.0%	
	% of Total	.2%	1.7%	23.4%	8.0%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	9	11	88	33	141	
	% within X	6.4%	7.8%	62.4%	23.4%	100.0%	
	% of Total	2.1%	2.6%	20.8%	7.8%	33.3%	
Total	Count	22	28	277	96	423	
	% within X	5.2%	6.6%	65.5%	22.7%	100.0%	
	% of Total	5.2%	6.6%	65.5%	22.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.928 ^a	6	.091
Likelihood Ratio	13.668	6	.034
Linear-by-Linear Association	.575	1	.448
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.33.

Pertanyaan 12

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	44	58	33	6	141
		% within X	31.2%	41.1%	23.4%	4.3%	100.0%
		% of Total	10.4%	13.7%	7.8%	1.4%	33.3%
Standar Perneriksaan Keuangan Negara	Count	29	78	23	11	141	
	% within X	20.6%	55.3%	16.3%	7.8%	100.0%	
	% of Total	6.9%	18.4%	5.4%	2.6%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	34	79	21	7	141	
	% within X	24.1%	56.0%	14.9%	5.0%	100.0%	
	% of Total	8.0%	18.7%	5.0%	1.7%	33.3%	
Total	Count	107	215	77	24	423	
	% within X	25.3%	50.8%	18.2%	5.7%	100.0%	
	% of Total	25.3%	50.8%	18.2%	5.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.158 ^a	6	.069
Likelihood Ratio	12.078	6	.060
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00.

Pertanyaan 13

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	33	51	36	21	141
		% within X	23.4%	36.2%	25.5%	14.9%	100.0%
		% of Total	7.8%	12.1%	8.5%	5.0%	33.3%
	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	14	47	55	25	141
		% within X	9.9%	33.3%	39.0%	17.7%	100.0%
		% of Total	3.3%	11.1%	13.0%	5.9%	33.3%
	Standard Profesional Akuntan Publik	Count	14	51	50	26	141
		% within X	9.9%	36.2%	35.5%	18.4%	100.0%
		% of Total	3.3%	12.1%	11.8%	6.1%	33.3%
Total	Count	61	149	141	72	423	
	% within X	14.4%	35.2%	33.3%	17.0%	100.0%	
	% of Total	14.4%	35.2%	33.3%	17.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.762 ^a	6	.010
Likelihood Ratio	16.153	6	.013
Linear-by-Linear Association	7.450	1	.006
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.33.

Pertanyaan 14

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	31	61	39	10	141
		% within X	22.0%	43.3%	27.7%	7.1%	100.0%
		% of Total	7.3%	14.4%	9.2%	2.4%	33.3%
	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	31	70	31	9	141
		% within X	22.0%	49.6%	22.0%	6.4%	100.0%
		% of Total	7.3%	16.5%	7.3%	2.1%	33.3%
	Standard Profesional Akuntan Publik	Count	28	69	29	15	141
		% within X	19.9%	48.9%	20.6%	10.6%	100.0%
		% of Total	6.6%	16.3%	6.9%	3.5%	33.3%
Total	Count	90	200	99	34	423	
	% within X	21.3%	47.3%	23.4%	8.0%	100.0%	
	% of Total	21.3%	47.3%	23.4%	8.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.450 ^a	6	.616
Likelihood Ratio	4.359	6	.628
Linear-by-Linear Association	.043	1	.835
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.33.

Pertanyaan 15

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audt Pemerintah	Count	16	29	46	50	141
		% within X	11.3%	20.6%	32.6%	35.5%	100.0%
		% of Total	3.8%	6.9%	10.9%	11.8%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara		Count	22	21	60	38	141
		% within X	15.6%	14.9%	42.6%	27.0%	100.0%
		% of Total	5.2%	5.0%	14.2%	9.0%	33.3%
Standard Profesional Akuntan Publik		Count	19	27	60	35	141
		% within X	13.5%	19.1%	42.6%	24.8%	100.0%
		% of Total	4.5%	6.4%	14.2%	8.3%	33.3%
Total		Count	57	77	166	123	423
		% within X	13.5%	18.2%	39.2%	29.1%	100.0%
		% of Total	13.5%	18.2%	39.2%	29.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.733 ^a	6	.258
Likelihood Ratio	7.771	6	.255
Linear-by-Linear Association	1.295	1	.255
N of Valid Cases	423		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00.

Pertanyaan 16

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	91	30	18	2	141
		% within X	64.5%	21.3%	12.8%	1.4%	100.0%
		% of Total	21.5%	7.1%	4.3%	.5%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	71	33	35	2	141	
	% within X	50.4%	23.4%	24.8%	1.4%	100.0%	
	% of Total	16.8%	7.8%	8.3%	.5%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	59	40	41	1	141	
	% within X	41.8%	28.4%	29.1%	.7%	100.0%	
	% of Total	13.9%	9.5%	9.7%	.2%	33.3%	
Total	Count	221	103	94	5	423	
	% within X	52.2%	24.3%	22.2%	1.2%	100.0%	
	% of Total	52.2%	24.3%	22.2%	1.2%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.114 ^a	6	.008
Likelihood Ratio	18.814	6	.004
Linear-by-Linear Association	13.890	1	.000
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67.

Pertanyaan 17

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	62	51	27	1	141
		% within X	44.0%	36.2%	19.1%	.7%	100.0%
		% of Total	14.7%	12.1%	6.4%	.2%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	44	59	34	4	141	
	% within X	31.2%	41.8%	24.1%	2.8%	100.0%	
	% of Total	10.4%	13.9%	8.0%	.9%	33.3%	
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	64	54	23	0	141	
	% within X	45.4%	38.3%	16.3%	.0%	100.0%	
	% of Total	15.1%	12.8%	5.4%	.0%	33.3%	
Total	Count	170	164	84	5	423	
	% within X	40.2%	38.8%	19.9%	1.2%	100.0%	
	% of Total	40.2%	38.8%	19.9%	1.2%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.204 ^a	6	.056
Likelihood Ratio	13.234	6	.039
Linear-by-Linear Association	.368	1	.544
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67.

Pertanyaan 18

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	423	100.0%	0	.0%	423	100.0%

X * Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Crosstabulation

		Akuntabilitas Pelaporan Keuangan				Total	
		Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
X	Standar Audit Pemerintah	Count	71	43	26	1	141
	% within X		50.4%	30.5%	18.4%	.7%	100.0%
	% of Total		16.8%	10.2%	6.1%	.2%	33.3%
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Count	50	25	58	8	141	
	% within X		35.5%	17.7%	41.1%	5.7%	100.0%
	% of Total		11.8%	5.9%	13.7%	1.9%	33.3%
Standard Profesional Akuntan Publik	Count	62	33	45	1	141	
	% within X		44.0%	23.4%	31.9%	.7%	100.0%
	% of Total		14.7%	7.8%	10.6%	.2%	33.3%
Total	Count	183	101	129	10	423	
	% within X		43.3%	23.9%	30.5%	2.4%	100.0%
	% of Total		43.3%	23.9%	30.5%	2.4%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.318 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	30.364	6	.000
Linear-by-Linear Association	3.359	1	.067
N of Valid Cases	423		

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33.